



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

S K R I P S I

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MUTIA REFNITA
NIM . 11721201084

PROGRAM S 1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021 M/1442 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisi Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit**, yang ditulis oleh:

Nama : Mutia Refnita
 NIM : 11721201084
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2021
 Pembimbing Skripsi


Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
 NIP. 19671112 200501 1 006

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan”, yang ditulis oleh:

Nama : Mutia Refnita
 NIM : 11721201084
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al Syakhsiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, M.Sy

Penguji I
Dr.H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 195807 12 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَكَ إِلَى الْغَدِ مَا تَقْدِرُ أَنْ تَعْمَلَهُ الْيَوْمَ

“Jangan menunda hingga esok hari pekerjaan yang dapat kamu kerjakan hari ini”

Kita bisa saja menunda waktu kapanpun kita mau

Tapi waktu tidak bisa menunggu kita

Mutia Refnita

UIN SUSKA RIAU



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Terimakasih atas rahmat dan karunia-Mu atas sebuah langkah usai sudah satu cita telah ku gapai untukmu abah dan amak tercinta yang tak pernah berhenti menyayangi ananda, ananda tahu ini tak sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan yang kalian berikan kepada ananda. Namun ananda berharap dengan ini mampu memberikan senyum kebahagiaan di hati kalian dan menjadi sebuah kebanggaan untuk kalian.

Teruntuk saudara saya Tri Apri Wandani dan Muhammad Fahri Ramadhan serta keluarga besar saya terimakasih atas semangat, motivasi dan do’a yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa berjuang sampai detik ini.

Para dosen Hukum Keluarga dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum terimakasih atas dedikasi yang telah kalian berikan sehingga mengantarkan kami menuju titik kemenangan ini. Untuk teman-teman Hukum Keluarga 2017 dan sahabat saya Era Zufialina, Yunia Nurisman, Suci Rahmadani, Alfi Nurzikri yang saya sayangi dan saya banggakan tetaplah menjadi teman, sahabat dan keluarga selamanya. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, dan waktu yang kalian berikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mutia Refnita, (2021): Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang terjadi di Kampung Lalang, terdapat fenomena yang bertentangan dengan kajian fiqh *mawarist*, karena tingginya rasa kekeluargaan sehingga kebanyakan masyarakat “menunda” membagikan harta warisan bahkan penundaan tersebut bisa bertahun-tahun setelah *muwarrits* meninggal. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah alasan para ahli waris yang menunda untuk melaksanakan pembagian harta warisan yang telah lama ditinggalkan oleh pewaris di Kampung Lalang. Penelitian ini dilakukan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka dari buku-buku referensi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah ahli waris dan tokoh agama yang mengetahui permasalahan penundaan waris di Kampung Lalang dengan mengambil 20 orang sampel sesuai pilihan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik penulisan menggunakan metode deskriptif dan deduktif menguraikan data dan menerangkan gambaran dari keterangan secara umum dan diambil kesimpulan secara khusus sesuai dengan data-data permasalahan yang terjadi. Adapun teknik analisa data diperoleh secara *Deskriptif Kualitatif* data tersebut peneliti uraikan berdasarkan persamaan data, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga di peroleh gambaran utuh tentang masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa alasan penundaan waris di Kampung Lalang ini adalah ahli waris tidak mau mempercepat karena salah satu orang tua masih hidup, mendahulukan musyawarah dan kesepakatan bersama antara para kerabat, tidak mau mendahului anak laki-laki pertama yang tahu tentang harta peninggalan, tidak dapat berkumpul karena jauhnya jarak tempat tinggal para ahli waris, keadaan ekonomi antara para ahli waris telah berkecukupan, dan belum jelasnya harta-harta yang ditinggalkan. Dari alasan-alasan tersebut penulis memiliki pandangan bahwa kebiasaan masyarakat menunda pembagian waris mestinya harus dirubah karena bertentangan dan menyalahi konsep hukum Islam.

Kata Kunci : Penundaan, Waris, Hukum Islam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga *syafaat* beliau akan kita rasakan di *yaumul mahsyar* nanti, Amin.

Peneliti menulis skripsi ini atas kerja keras untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis dengan mengangkat sebuah topik dengan judul **“ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN”**. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang se dalam-dalamnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Yang tercinta kedua orang tua, Ayahanda Azmar dan Ibunda Ilal Farida yang telah merawat Ananda dari kecil hingga sekarang ini, yang telah memberikan semua do'a dan kasih sayang yang tulus setiap detik tanpa henti yang tidak akan pernah dapat Ananda balas sampai kapanpun, semoga selalu dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.
2. Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnedi, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph.d sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Wahidin, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak H. Maghfirah, M.A sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, selaku pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Ahmad Fauzi S.Hi., M.Ag, selaku dosen Penasehat Akademis. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dari semester awal hingga akhir.
7. Bapak Rasdanelis, S.Ag., SS., M.Hum selaku kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, terimakasih telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi perpustakaan sehingga penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kepada Era Zufialina, Yunia Nurisman, Alfi Nurzikri, Nur Azmi, Suci Rahmadani, Annisa Putri Amanda, Siti Maisarah, dan terutama pembimbing dadakan saya kakanda Usman Purnomo dan teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga 2017 lokal A, juga kepada Tim Touring paling asik terimakasih telah mau berjuang bersama, khususnya lagi kepada tim pejuang galon dan kos gaul yang senantia menemani serta kepada orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini terimakasih atas segala bantuan yang diberikan dan telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi penulis terimakasih atas segala dukungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Masyarakat yang menjadi narasumber dan para pegawai pemerintahan Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit sampai Kabupaten Siak terimakasih telah memberikan izin serta kerja samanya terhadap penyusunan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Suska Riau di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, yang telah bersama-sama selama menjalani masa kukerta dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata. Serta sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah meridhoi langkah kita semua.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk penulis yang pastinya tak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam pengetahuan, dan perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan dapat diaplikasikan dalam masyarakat.

Pekanbaru, 10 Oktober 2021
Penulis,

MUTIA REFNITA
NIM. 11721201084

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	15
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Sistematika Penulisan	21
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kampung Lalang.....	23
B. Kondisi Geografis dan Demografis.....	27
C. Ekonomi dan pekerjaan masyarakat.....	29
D. Pendidikan.....	31
E. Keagamaan	34
F. Sosial dan Budaya	35
 BAB III LANDASAN TEORI	
A. Defenisi Waris.....	37
B. Dasar dan Sumber Hukum Waris.....	40
C. Asas-Asas Hukum Waris Islam	46
D. Syarat dan Rukun Waris.....	55
E. Sebab-Sebab Menerima Waris	57
F. Faktor Penghalang Waris Menurut Hukum Islam	61
G. Ahli Waris dan Bagiannya	69
H. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	78
I. Waktu Pembagian Warisan	81
J. Penundaan Pembagian Waris	85
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit.....	94
B. Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit.....	106
C. Analisa Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan.....	116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Nama Kepala Desa	26
Tabel 2.2	Data Tingkat Perkembangan Penduduk Kampung Lalang...	28
Tabel 2.3	Struktur Mata Pencaharian Pokok Masyarakat	30
Tabel 2.4	Sarana Prasarana Pendidikan Formal di Kampung Lalang...	32
Tabel 2.5	Klasifikasi Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2020.....	33
Tabel 2.6	Agama Masyarakat Kampung Lalang	34
Tabel 2.7	Sarana dan Prasarana Peribadatan Kampung Lalang.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta warisan adalah harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya yang terdekat seperti keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Yang menerima harta warisan disebut (ahli waris).¹ Untuk pembagian harta warisan, hukum Islam telah mengatur dengan sangat jelas dalam al-Qur'an. Allah SWT dengan segala rahmat-Nya juga sudah memberikan bimbingan untuk mengarahkan manusia dalam urusan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan ini memiliki tujuan supaya diantara manusia yang sudah ditinggalkan tidak menimbulkan pertengkaran dan perselisihan.²

Ilmu yang mempelajari tentang warisan disebut Ilmu Mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *Fara'idh* (الفرائض), yang diartikan oleh para ulama *farriidhiyyun* semakna dengan kata *mafrudhah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Dalam literatur fiqih Islam, hukum waris Islam dikenal dengan beberapa nama atau sebutan yaitu hukum waris, hukum *faraid* dan hukum *al-mirats*.³

¹ Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru : Suska Press, 2014), h. 16

² Redaksi Dalam Islam "Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam", artikel dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/pembagian-warisan-menurut-hukum-islam>. diakses pada 03 Agustus 2020.

³ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴ Tujuan ilmu *faraidh* (ilmu mawaris) ialah untuk menyelamatkan harta benda si mayit agar terhindar dari pengambilan harta oleh orang-orang yang tidak berhak menerimanya dan agar jangan ada orang-orang yang memakan harta hak milik orang lain, dan hak milik anak yatim dengan jalan yang tidak halal. Inilah yang dimaksud Allah SWT dalam firman-Nya surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁵

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. al-Baqarah [2] : 188)

Rasulullah SAW menekankan kepada kaum muslimin untuk mempelajari ilmu *faraidh* (ilmu mawaris), karena ilmu ini lama-lama akan lenyap, yakni orang-orang akan menjadi malas untuk melaksanakan pembagian pusaka sebagaimana mestinya yang diatur hukum Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998) h. 354

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2012), Cet. 1. QS. al-Baqarah [2] : 188

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروثنا الفضل بن عبد الجبار ثنا
النضر بن شميل أنبأ عوف بن أبي جميلة عن سليمان بن جابر الهجري عن
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
"تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَ عِلْمُوهُ النَّاسَ وَ تَعَلَّمُوا الْفَرِیضَ وَ عِلْمُهَا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرُؤُ
مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَ يُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اِثْنَانِ فِي الْفَرِیضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا
يُخْبِرُهُمَا (أخرجه الحكم) ⁶

Artinya : Abu al-Abbas Muhammad bin Ahmad al-Mahboubi mengabarkan kepada kami tentang warisan, al-Fadl ibn Abd al-Jabbar dan al-Nadr ibn Shamil, Awf ibn Abi Jamila dari Sulaiman bin Jaber al-Hijri dari Abdullah bin mas'ud r.a berkata : Bersabda Rasulullah - Shalallahu 'alaihi wasallam : *"Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkan kepada orang lain dan pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena saya adalah seorang pria dalam tahanan (mati) dan ilmu akan disita, akan muncul dua orang yang bersengketa sampai keduanya berbeda dalam pembagian waris dan mereka tidak akan menemukan seseorang untuk memberi petunjuk kepada keduanya"*. (HR. Al-Hakim)

Dari hadist ini dapat diketahui betapa pentingnya ilmu *faraidh* atau hukum waris itu sampai ditegaskan Rasulullah bahwa itu separuh Ilmu. Para ulama menetapkan mempelajari ilmu *faraid* (ilmu mawaris) hukumnya *fardhu kifayah*, artinya kalau dalam segolongan masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajari ilmu *faraidh* maka berdosa orang-orang di kampung itu. Akan tetapi jika ada yang mempelajari walaupun hanya satu atau dua orang saja, maka terlepaslah semuanya dari dosa.⁷

⁶ Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburri, *Mustadrak 'ala Sahihain*, (Beirut : Daarul Kutub ilmiah, 1990), trj. Musthafa Abdul Qadir atha', juz. 4, Bab. Kitab Faraidh, h. 369

⁷ Muhibbnin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'at Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum waris dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna, tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Qur'an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma'. Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an secara terperinci, seperti hukum-hukum waris. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ۚ وَلِلْإِخْوَةِ فَلَاةِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝⁸

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang

⁸ Q.S. an-Nisa' (4) : 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. an-Nisa’ [4]: 11)

Dalam hal ini pembagian harta waris tidak mengandung unsur kesewenang-wenangan terhadap para ahli waris, bahkan Islam memperbaiki sistem kewarisan pada zaman dahulu serta mengandung unsur keadilan yang mutlak, maka sebab mempusakai berdasarkan ikatan persaudaran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۙ⁹

Artinya : “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”. (QS. al-Ahzab [33] : 6)

Ibnu Khaldun seorang filosof Islam yang sangat populer mengatakan bahwa “manusia memiliki tabiat sosial”. Manusia harus memiliki hubungan sosial dan hal ini merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Jika hubungan sosial tidak terwujud maka hal-hal yang dikehendaki oleh

⁹ QS. al-Ahzab [33] : 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Allah SWT pun tidak terwujud, berupa memakmurkan dunia dan menjadikan khalifah di muka bumi.¹⁰

Meskipun manusia sadar akan ketergantungan antara mereka, tetapi tidak jarang di antara manusia yang tidak menghiraukan hal tersebut. Mereka menganggap bisa melakukan suatu hal sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain asalkan mereka memiliki segalanya, dalam hal ini adalah harta. Salah satu yang menjadi sumber harta seseorang adalah warisan yang didapatkan dari *al-Muwarriis* yang telah meninggal dunia. Dalam hal pewarisan sudah menjadi ketentuan bahwa ahli waris itu pasti lebih dari seorang, maka dari itu perlu diketahui siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan si *muwaris* agar tidak terjadi sistem kewarisan secara individual atau kolektif.¹¹

Indonesia pada dasarnya terdiri dari banyak suku, budaya dengan banyaknya keragaman yang terjadi di masyarakat, hal ini tentu menyebabkan terdapat perbedaan sudut pandang dan pola hidup masyarakat, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai hukum adat yang berbeda.¹² Kadar kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak

¹⁰ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, alih bahasa oleh Masturi Ilham et.al, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2011), Cet. 1, h. 69-71.

¹¹ Suhayib, "Pemikiran Said Nursi dalam Pemberdayaan Politik (al-Tahkim al-Siyasi) Masyarakat Muslim Turki (Studi atas Kitab al-Matsnawi an-Nuri), *an-Nida'*, (Riau: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN SUSKA, 2013), Jilid 38. h. 62

¹² Yahya Harahap, *Peraktek Hukum Waris tidak pantas membuat generalisasi* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), h. 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

teori, lahirilah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama dibidang perdata termasuk hukum kewarisan.

Sultan asy-Syaidi asy- Qasim Tsani Abdul Jalil Syaifuddin merupakan sultan yang mencapai masa keemasannya pada pemerintahan kedua belas di Kesultanan Siak Sri Indrapura ia mempunyai komitmen kuat untuk memajukan Siak dengan landasan nilai-nilai Islami. Hal ini terlihat dengan dibangunnya “*Mahkamah Syari’ah*” untuk mengadili berbagai perkara perdata maupun pidana, serta membangun sarana pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bertaqwa. Sarana pendidikan yang dimaksud yaitu; *Madrasah Taufiqiyah al-Hasyimiyah* (untuk laki-laki) dan *Madrasah an-Nasa’* (untuk perempuan). Dengan demikian maka interaksi adat dan Islam memasuki era dengan terciptanya Islamisasi adat Melayu hal ini terungkap dalam pepatah yang mengatakan :

“Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah”¹³

Oleh karena itu, maka seluruh nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat Melayu-Siak wajiblah merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Karena, semua nilai budaya yang dianggap belum serasi dan sesuai dengan ajaran Islam haruslah “diluruskan” dan disesuaikan dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu termasuk di dalamnya masalah kewarisan.

¹³ Tenas Affendy, *Tunjuk Ajar Melayu : Butir-Butir Budaya Melayu Riau*, (Pekanbaru : Dewan Kesenian Riau, 1994), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa sekarang ini masyarakat Melayu dalam pelaksanaan pembagian secara praktis telah dijumpai masalah-masalah waris, yang secara lengkap tidak dijelaskan dalam *nash*. Hal ini tentunya memberi kesempatan bagi manusia untuk menggali dan menginterpretasikan teks-teks *nash* tersebut berdasarkan pemikiran mereka. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mengatakan: “Bahwa hak-hak kebendaan dan hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan merupakan hak ahli waris secara murni. Dengan demikian pelaksanaan diserahkan kepada setiap individu.”¹⁴

Karena hal itu, pola pembagian kewarisan dapat saja dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di tempat itu. Namun ada pertanyaan yang muncul apakah masyarakat di daerah ini masih tetap konsekwen melaksanakan hukum kewarisan Islam ?, jika dilihat dari fakta yang terjadi masih dijumpai ada sebagian masyarakat yang masih enggan melaksanakan pembagian harta warisan, dengan alasan yang bermacam-macam sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut. Padahal telah dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa Allah mengancam orang-orang yang seperti ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 14 yang berbunyi :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝١٤

¹⁴ Mukhtar Yahya dan Fachturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : al-Ma’arif, 1983), h. 367

¹⁵ QS. an-Nisa’ [4] : 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : *“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”* (Q.S. an-Nisa’ (4) : 14)

Dari fakta tersebut kenyataannya masih banyak yang belum atau bahkan meninggalkan pelaksanaan pembagian harta warisan yang sesuai dengan syari’at Islam. Padahal prinsip dalam kewarisan Islam adalah *Ijbari*, dimana peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.¹⁶ Hal ini menimbulkan akibat, baik komposisi bagian yang diterima bahkan kemudian hari akan terjadi konflik disebagian keluarga yang menunda pembagian harta warisan.

Yang menjadi permasalahan adalah bahwa Allah SWT menetapkan suatu hukum berdasarkan suatu kemaslahatan, apalagi al-Qur’an telah menjelaskan betapa pentingnya pelaksanaan pembagian warisan ini. Hal ini dilakukan karena harta pusaka adalah suatu wasilah yang paling besar pengaruhnya dalam memiliki harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain itu sesuatu yang harus dilakukan.¹⁷

Jadi hal inilah yang belum terealisasi oleh sebagian masyarakat di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Apabila salah seorang bahkan kedua orang tua mereka meninggal dunia para keluarga

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), Cet. 1, h. 17

¹⁷ Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), Cet. 1, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hanya terfokus kepada adat istiadat seperti menujuh hari, empat puluh hari, dan haul untuk mendo'akan orang tua mereka yang meninggal (*muwarris*) setelah itu mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Mereka lupa terhadap suatu kewajiban yang lain yakni pelaksanaan hukum kewarisan yang semestinya harus dilaksanakan segera setelah pewaris meninggal. Yang apabila tidak dilaksanakan, nantinya dikhawatirkan akan memberikan kemudharatan di kemudian hari.

Faktor penundaan pembagian harta warisan menurut Ter Haar, sebelum terbaginya harta warisan itu memang disediakan harta untuk mencukupi kebutuhandan keinginan material keluarga yang ditinggalkan.¹⁸ Sementara ada beberapa faktor menurut Amir Syarifuddin penundaan tersebut biasanya disebabkan karena tidak ada yang pantas dibagi, karena harta tidak dapat dibagi-bagi secara terpisah, karena memang ahli waris tidak menginginkan harta tersebut dibagi secara terpisah, berbagai kasus kewarisan yang terangkat di Pengadilan Agama disebabkan banyaknya harta peninggalan yang tidak jelas, atau hilangnya data harta peninggalan tersebut.

Ketidak jelasan harta peninggalan atau hilangnya data harta disebabkan tidak tercatatnya ukuran luas dan jumlah harta peninggalan, dan juga tidak jelas yang mana harta bawaan suami istri, dan mana harta bersama. Dengan demikian akan menimbulkan masalah dalam penyelesaian pembagian warisan yang akan dibagi. Bahkan ketidak jelasan harta peninggalan dapat

¹⁸ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu : Zara Abadi, 2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan peluang kepada ahliwaris yang lemah imannya untuk memanipulasi data harta peninggalan tersebut. Juga bisa menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan sehingga menyebabkan putusnya hubungan tali silaturahmi.¹⁹

Di antara alasan-alasan di atas apabila harta warisan tersebut dibagi secepatnya setelah pewaris meninggal dunia maka akan mengganggu kelangsungan hidup mereka yang ditinggalkan seperti, para ahli waris menghendaki kelangsungan hidup janda atau duda dan anak-anak pewaris yang belum dewasa (belum mentas) dan belum bisa menghidupi dirinya sendiri akan mengganggu kelangsungan hidup mereka yang bergantung dari hasil harta warisan tersebut. Bagi anak-anak pewaris yang masih kecil, sangatlah tidak mungkin untuk menghidupi dirinya sendiri tanpa menggunakan harta orang tuanya sedangkan ia belum bekerja. Jadi dengan ditundanya pembagian harta warisan tersebut, janda dan anak pewaris yang belum mentas dapat tetap hidup layak seperti ketika pewaris masih hidup.

Biasanya pelaksanaan pembagian harta warisan ini ditunda sampai anak yang belum dewasa (belum mentas) telah mampu menghidupi dirinya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar anak kecil tersebut kelak akan menjadi anak yang mandiri, bisa bekerja paling tidak untuk dirinya sendiri, tidak bergantung pada saudaranya atau orang lain. Untuk menunggu anak-anak mentas dan mampu menghidupi dirinya sendiri, anak-anak tersebut membutuhkan biaya keperluan kelangsungan hidupnya. Dengan ditundanya

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1995), h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembagian harta warisan ini, diharapkan kehidupan rumah tangganya yang ditinggalkan tidak akan mengalami banyak perubahan, terutama bila yang ditinggalkan hidupnya sama seperti ketika suaminya masih hidup dengan memanfaatkan harta warisan tersebut.²⁰

Namun alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kampung Lalang bukanlah demikian, mereka menunda dengan alasan yang kurang bisa diterima sesuai dengan aturan syariat Islam yang mana asas kewarisan adalah *ijbari* dan membagi warisan merupakan perintah untuk kebaikan kelangsungan hidup ahli waris. Dan harta warisan tersebut harus segera dibagikan jika tidak adalagi alasan yang membuat pembagian warisan tersebut harus ditunda.

Salah satu permasalahan yang terjadi di Kampung Lalang yaitu setelah pewaris meninggal empat tahun yang lalu para ahli waris menunda pembagian warisan dengan alasan istri dari pewaris masih hidup, setahun kemudian istri pewaris atau ibu dari ahli waris pun meninggal dunia, namun harta warisan belum juga dihitung dan dibagi oleh para ahli waris, dengan berbagai alasan yang semakin membuat keluarga itu berselisih antara para ahli waris, padahal di antara semua ahli waris itu sudah dewasa dan mentas, bahkan para ahli waris telah memiliki keluarga masing-masing, bahkan salah satu ahli waris telah menjadi janda dan ia membutuhkan harta yang jelas untuk kelangsungan hidupnya, namun ia tidak bisa menggunakan harta yang ditinggalkan dengan leluasa karena perselisihan yang semakin berlarut-larut.

²⁰ *Ibid*

Beranjak dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, penting kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah warisan ini maka dari itu penulis tertarik ingin mengangkat masalah ini sebagai penelitian ilmiah dengan judul : **“ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN”**

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, serta tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebatas alasan dari menunda pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2020-2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana Sistem pelaksanaan pembagian harta warisan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ?
2. Apakah alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli waris di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian harta warisan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui apa saja alasan yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam kajian-kajian *fiqh Mawaris* sebagai salah satu topik spesifik pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum secara khusus serta

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau secara umum.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.²¹ Adapun metodologi dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan melalui penelitian di lapangan (*Field Research*) yaitu penyusunan dan mencari data secara langsung di tempat kejadian yaitu di lokasi penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, karena ditempat tersebut ditemukan penundaan pembagian harta warisan, selain itu lokasi penelitian ini merupakan tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan penulis melakukan penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para ahli waris/keluarga yang menunda pelaksanaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kampung

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2019), Cet. 1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Sedangkan objek penelitian ini adalah alasan masyarakat untuk menunda pelaksanaan pembagian harta warisan.

4. Populasi dan Sample

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ahli waris/ keluarga dan para tokoh agama yang mengetahui masalah yang terjadi di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit yang menunda pembagian harta warisan, namun karena banyaknya populasi maka penulis tidak mengetahui jumlahnya secara pasti.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian. Oleh karena populasi yang tidak diketahui jumlahnya, maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *Porpositive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Populasi yang dipilih adalah 20 orang yang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah :

- a. Data Primer

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Cet ke-3, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yakni data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dari para ahli waris yang menunda pelaksanaan pembagian harta warisan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

b. Data Sekunder

Yakni data-data yang diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Yaitu bahan atau data pendukung terhadap data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data primer maupun sekunder, adapun metode tersebut adalah :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung oleh peneliti terhadap permasalahan yang ditemukan atau kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terjun langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelapangan yaitu ke Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, untuk mengetahui peristiwa secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti dengan narasumber data tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan penulis kepada ahli waris yang menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dan tokoh masyarakat yang mengetahui masalah yang akan diteliti.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang mana peneliti menyelidiki dengan melihat data terkait dengan masalah yang diteliti, benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, surat-surat lainnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh maka peneliti menggunakan analisa data secara *Deskriptif kualitatif*. Di mana *Deskriptif*

kualitatif adalah setelah data-data terkumpul, data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan lalu dibandingkan antara satu sama lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti ini.

8. Teknik Penulisan

Adapun bentuk penelitian dalam laporan penelitian ini ialah dengan menggunakan :

- a. Metode *deskriptif*, yaitu metode yang menguraikan data dan menggambarkan data-data menurut apa adanya sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilokasi penelitian.
- b. Metode *deduktif*, yaitu metode penelitian yang menerangkan gambaran data-data dari keterangan secara umum, lalu diambil kesimpulan secara khusus.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah penundaan waris, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan penundaan waris antara lain :

Pertama, Fela Peryandja 11521105244 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul "Penundaan Pembagian Warisan dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rengat Perspektif Hukum Islam”.²³ Peneliti ini memfokuskan tentang penundaan pembagian warisan yang menjadi kebiasaan masyarakat melayu selalu menunda, dan penundaan tersebut tidak pasti berapa lamanya tergantung kesepakatan pihak keluarga, namun tidak dalam masa berduka dengan permasalahan ini terjadinya penundaan waris karena kebiasaan tersebut.

Kedua, Suci Suharini Nim: 0606008815 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Perkembangan Hukum Kewarisan pada Masyarakat Melayu Riau pada Saat ini”.²⁴ Penelitian ini memfokuskan tentang perbedaan nilai budaya yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan zaman hukum waris pada masyarakat Melayu Riau berubah berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh sesama keluarga, kini lazim menyamakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki dalam penerimaan warisan.

Ketiga, Abdul Kadir Nim: 10521001035 Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul “Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung

²³ Fela Peryandja, Skripsi: “Penundaan Pembagian Warisan dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam”. (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim). <http://repository.uin.suska.ac.id> 06 Agustus 2020

²⁴ Suci Suharini, Skripsi: “Perkembangan Hukum Kewarisan pada Masyarakat Melayu Riau pada Saat ini.” (Depok: Universitas Indonesia). <http://repository.ui.ac.id>. (20 Agustus 2020)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekaki).”²⁵ Penelitian ini memfokuskan tentang adat di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki tentang Penundaan Pembagian harta waris, karena warga setempat hanya memfokuskan dengan adat istiadat seperti menuju hari, empat puluh hari dan haul serta tidak membagikan harta warisan secara hukum Islam. Dan kurang tahunya masyarakat tentang hukum kewarisan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan alur pembahasan secara sistematika dan mengarahkan pembahasan serta pemahaman maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran umum tentang Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah Kampung Lalang, kondisi geografis dan demografis, Ekonomi dan pekerjaan masyarakat, Pendidikan, Keagamaan, Sosial dan budaya.

BAB III : Landasan teori meliputi kewarisan dalam hukum Islam di antaranya definisi waris, dasar dan sumber hukum waris, asas-

²⁵ Abdul Kadir, Skripsi: “Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)”. (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim). <http://repository.uin.suska.ac.id>. (06 September 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asas hukum waris Islam, syarat dan rukun waris, sebab-sebab menerima waris, faktor penghalang waris menurut hukum Islam, ahli waris dan bagiannya, hak dan kewajiban ahli waris, Waktu Pembagian waris, penundaan pembagian waris, pengertian penundaan, faktor penundaan waris dan upaya mengatasi dampak negatifnya.

BAB IV : Hasil Penelitian, meliputi :

- a. Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit
- b. Alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit.
- c. Analisa hukum Islam terhadap alasan penundaan pembagian harta warisan.

BAB V : Penutup dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kampung Lalang.

Menurut sejarah yang telah dihimpun oleh Pemerintah Kampung Lalang, sebelum Desa Lalang menjadi kampung, yang pertama datang membuka lahan/hutan di Desa Lalang ini adalah suku China Tiongkok diperkirakan tahun 1736. Melihat tanahnya subur suku China Tiongkok tersebut kembali pulang ke Tiongkok menjemput keluarga mereka untuk dibawa pindah ke lahan yang telah mereka bersihkan untuk dibuat kebun.²⁶

Semenjak berangkat dari Tiongkok didalam perjalanan perahu yang membawa keluarga tersebut karam dan sampai saat ini tidak satupun yang tahu. Menurut keterangan keluarga mereka di Tiongkok bahwa benar rombongan tersebut telah berangkat. Akhirnya lahan yang telah mereka bersihkan menjadi terlantar sehingga menumbuhkan semak belukar, yang dekat dengan laut dan banyak ditumbuhi ilalang, batang keduduk, batang ketelu dan lain-lain.²⁷

Selain orang Tiongkok para pelaut Bugis Bone juga sering singgah ditempat yang banyak tumbuh batang ilalang untuk diambil dan dijadikan atap, beberapa lama setelah itu suku Bugis Bone kembali membuka lahan yang telah lama terlantar untuk mereka jadikan ladang, kemudian tinggallah

²⁶ Pemerintah Kampung Lalang, *Profile Kampung Lalang*, (Lalang : Sekretariat Desa, 2020), h.3

²⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku Bone yang keluarga mereka bernama Daeng Pelangidan isterinya bernama Gan Fatimah mereka memiliki tiga orang anak yaitu : Abu Thalib, Abu Daut, Kamisah. Anak ketiga yang bernama Kamisah tinggal di Siak karena diambil oleh Sultan Syarif Qasim untuk dijadikan mak inang.

Karena seringnya terjadi keributan perebutan lahan, maka dibentuklah ketua kampung yang ditunjuk oleh Raja Siak adalah Abu Thalib menjadi ketua kampung tahun 1832. Pada tahun 1835 Abu Thalib diangkat menjadi datok (penghulu) sampai tahun 1865. Agresi kedua terjadi pada tahun 1949 dan keadaan di Lalang sewaktu itu tidak ada korban karena kuatnya pertahanan masyarakat dan tentara yang waktu itu disebut TKR.²⁸

Perdamaian di masa itu disebut tiga prom (pos penjaga). Pos 1 dijaga oleh Mumbang beserta tentara TKR, pos II dijaga oleh sersan Kasim Lubis beserta anggota TKR, pos III dijaga oleh sersan Hasan BK. Menjelang akhir tahun 1950 pulanglah seorang TNI bernama Abu S dari Tanjung Pinang untuk menetap di Kecamatan Sungai Apit yang berdomisili di Lalang.

Oleh karena H. Dolah yang sudah tua ia menyerahkan jabatannya kepada Buyung pada tahun 1950 bersama rekan-rekannya Abu. S, Aduat, Ibrahim dan A. Thalib Dol dengan membentuk satu ikatan yang diberi nama Pemuda Maju Bersama, sebagai kerani yaitu A. Ganlg berakhirlah sampai tahun 1955 di Kampung Lalang diadakan pemilu pertama, partai yang masuk saat itu :

1. PERTI

²⁸ Ibid, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. IPKI
3. MASYUMI
4. PKI

Keadaan sewaktu itu :

Pada tahun 1971 diadakan pemilu yang mana keadaan negara waktu itu belum stabil termasuk Kampung Lalang, orang yang terlibat G 30 S PKI kelompok C / Blok C tidak dibenarkan untuk turut serta memilih, dan untuk pemilihan mereka dikurung di tempat tertentu. Pada tahun 1977 diadakan pemilu yang ke III keadaan negara waktu itu juga belumlah aman termasuk Kampung Lalang.²⁹ Pada tahun 1963 habislah masa jabatan penghulu Buyungdiganti oleh PJS saudara Amirsyah, yang pada akhir tahun 1983 ditunjuklah Abdul Hamid menjadi penghulu. Pada tahun 1986 Kampung Lalang diganti namanya menjadi Desa Lalang yang kemudian dibagi tiga dusun, antara lain:³⁰

1. Dusun Semerung
2. Dusun Lalang
3. Dusun Bunsur

Pada masa tahun 1991 dipilihlah oleh masyarakat Lalang saudara Zahari sebagai kepala desa terpilih sampai habis jabatan. Pada tahun 2001 terpilihlah saudara Marbansi sebagai kepala desa Pengganti Kades Zahari. Masa beliau lah tepatnya tahun 2002 dusun III (bunsur) dimekarkan menjadi

²⁹ *Ibid*, h.5

³⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

desa baru yang diberi nama Desa Bungsur. Pada tahun 2007 habislah masa jabatan Marbansi sebagai kepala desa datanglah instruksi dari bupati melalui camat ditunjuklah saudara Kasim Kusmiran menjadi PLT Kepala Desa Lalang. Sementara datangnya PJS dari Kecamatan pada awal 2007 diangkat saudara PJS dari kecamatan yang bernama H. Walmala sampai pada tanggal 10 juni 2008.

Pada tanggal 11 juni 2008 dilantiklah oleh Bupati Siak, kepala desa terpilih yang bernama Muhammad Fatkullah yang pemilihannya pada bulan mei 2008. Pada tahun 2013 habislah masa jabatan Muhammad Fatkullah sebagai kepala desa, kemudian datanglah instruksi dari bupati melalui camat ditunjuklah PJS dari kecamatan Abdul Razak pada tahun 2013 sampai akhir tahun 2014.³¹ Pada tanggal 08 september 2016 dilantiklah oleh Bupati Siak, penghulu kampung terpilihlah saudara Daroni menjadi Penghulu Lalang sampai saat ini dengan SK Pengangkatan No. 385/HK/KPTS/2015 Tanggal 18 september 2015.

Tabel 2.1
Daftar Nama Kepala Desa

No.	Nama Pejabat	Tahun Menjabat
1.	Abu Thalib	1835-1865
2.	Buyung – Abdul Hamid	1983 -
3.	Zahari	1991 – 2000
4.	Marbansi	2001 – 2005
5.	H. Walmala	2005 – 2008
6.	Muhammad Fatkullah	2008 – 2013
7.	Abdul Razak	2013 – 2014
8.	Daroni	2015 – 2021

Sumber data : *Profil Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupate Siak 2020*

³¹ *Ibid*, h.6

B. Kondisi Geografis dan Demografis

1. Kondii Geografis.

Kampung Lalang termasuk satu dari 14 Kampung dan satu kelurahan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kampung ini termasuk daerah daratan dengan ketinggian 64 m dari permukaan air laut. Kampung Lalang terbagi atas tiga dusun dan memiliki 6 RW (Rukun Warga) dan 12 RT (Rukun Tetangga). Jarak Kampung Lalang dari kota Kecamatan Sungai Apit 13 Km dengan jarak tempuh 12 menit, kemudian jarak ke ibu kota Kabupaten Siak 63 Km , jika menggunakan kendaraan bermotor bisa menghabiskan waktu tempuh sekitar 1 jam 50 menit perjalanan, jarak ke ibu Kota Provinsi Riau 156 Km dengan lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor sekitar 4 jam perjalanan.³²

Luas wilayah secara keseluruhan 8175 Ha, yang terdiri dari permukiman warga seluas 2719 Ha, perkebunan warga seluas 4532 Ha, luas tempat pemakaman 2890 m², perkarangan seluas 418 Ha, perkantoran seluas 8670 m² dan terakhir prasarana umum lainnya seluas 487 Ha.

Dilihat dari bentangan wilayah letak geografis, Kampung Lalang ini mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kampung Sungai Kayu Ara
- b) Sebelah Selatan : Kampung Bunsur
- c) Sebelah Barat : Kampung Teluk Mesjid

³² *Ibid*, h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Sebelah Timur : Selat Lalang.³³

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data tingkat perkembangan kampung dan kelurahan tahun 2020, Kampung Lalang mempunyai jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 1711 jiwa dengan rincian 880 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 831 jiwa berjenis kelamin perempuan yang terhimpun dalam jumlah 567 kepala keluarga. Kemudian jumlah penduduk di Kampung Lalang tahun 2019-2020 meningkat menjadi 1950 jiwa dengan perincian 960 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 990 jiwa berjenis kelamin perempuan yang terhimpun dalam jumlah kepala 450 kepala keluarga.

Adapun untuk lebih jelasnya pertumbuhan penduduk di Kampung Lalang dua tahun terakhir perhatikan tabel berikut :

Tabel 2.2
Data Tingkat Perkembangan Penduduk Kampung Lalang

No.	Jumlah	Tahun Lalu	Tahun Ini
1.	Laki-Laki	880	960
2.	Perempuan	831	990
	Jumlah	1711 orang	1950 orang
	Jumlah KK	563 KK	567 KK
	Kepadatan Penduduk	20,77	Per km ²

Sumber data : *Profil Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui penduduk Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak hampir berimbang antara jenis kelamin laki-laki 960 jiwa dan perempuan 990 jiwa. Dapat dikategorikan bahwa populasi laki-laki lebih sedikit dibandingkan populasi

³³ *Ibid*

perempuan. Maka angka populasi berdasarkan jenis kelamin ini menunjukkan kondisi yang sedikit berimbang antara jumlah laki-laki dengan perempuan.³⁴

C. Ekonomi dan pekerjaan Masyarakat

Sumber mata pencaharian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang ada di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak memiliki berbagai ragam mata pencaharian. Dengan pembangunan di bidang perekonomian semata-mata diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁵

Di antaranya dalam sektor pertanian salah satu produk unggulan dibidang pertanian ini adalah kebun durian yang sudah populer dalam masyarakat bahkan pemasarannya sampai keluar kampung dan kabupaten kota, kemudian sektor peternakan jenis populasi ternak yang banyak di Kampung Lalang adalah Ayam Kampung ada 319 orang yang memiliki ternak ini dengan jumlah seluruh populasinya 200 ekor Ayam Kampung, perikanan dalam sektor perikanan ini masyarakat menggunakan berbagai macam alat produksi budidaya ikan laut dan payau diantaranya pancing, pukat dan jala dan hasil produksi terbesar di Kampung Lalang adalah ikan teri/bilis sebanyak 400 kg, sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga,

³⁴ *Ibid.* h. 8

³⁵ *Ibid.* h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industri menengah dan besar, dan terakhir sektor jasa.³⁶ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.3
Struktur Mata Pencaharian Pokok Masyarakat

No.	Jenis Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	100	50
2.	Buruh Tani	93	45
3.	Pegawai Negri Sipil	6	15
4.	Pedagang Keliling	1	1
5.	Nelayan	16	-
6.	Montir	5	-
7.	Perawat swasta	-	1
8.	Bidan swasta	-	1
9.	Pembantu Rumah Tangga	-	15
10.	Polri	1	-
11.	Jasa Pengobatan Alternatif	1	1
12.	Pengusaha besar	5	-
13.	Karyawan Perusahaan Swasta	14	9
14.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	66	4
15.	Pensiunan PNS	4	-

Sumber data : *Profil Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mata pencaharian masyarakat di Kampung Lalang cukup bervariasi dan secara umum mata pencaharian masyarakat Kampung Lalang bekerja sebagai petani 150 orang dan Buruh Tani sebanyak 138 orang, dan mata pencaharian lain dari yang banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai Karyawan Perusahaan Pemerintah sebanyak 70 orang, masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah sebanyak 27 orang, sebagai Pegawai Negri Sipil sebanyak 21 orang, sebagai Karyawan Perusahaan Swasta sebanyak 23 orang, sebagai nelayan 16 orang,

³⁶ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai Pembantu Rumah Tangga 15 orang, sebagai Montir 5 orang, menjadi pengusaha besar 5 orang, sebagai Pensiunan PNS 4 orang, sebagai Bidan/Perawat swasta 2 orang, 2 orang sebagai pedagang keliling dan dua orang sebagai pemberi jasa pengobatan alternative sebanyak 2 orang.³⁷

D. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan perorangan, keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Ahmad D Marimba dan Mahmud (2012), “Memberi pengertian pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani untuk membentuk kepribadian utama, membimbing keterampilan jasmaniah dan rohaniah sebagai perilaku nyata yang bermanfaat pada kehidupan siswa di masyarakat.”³⁸

Pendidikan juga memiliki makna penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia agar menguasai ilmu pengetahuan maka dengan ilmu, manusia bisa memahami agama yang dianutnya dengan baik.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan yang menjadi salah satu prioritas utama dari perkembangan pembangunan di Kampung Lalang, yang mana pada umumnya masyarakat Kampung Lalang bisa

³⁷ *Ibid*, h. 14

³⁸ Ainun Dtf, “Pengertian Pendidikan : Fungsi, Jenis, Tujuan Pendidikan (Ahli & Umum)”, artikel dari <https://salamadian.com/pengertian-pendidikan> Diakses pada 12 Februari 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menulis dan membaca disebabkan prasarana pendidikan masih memadai, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 2.4
Sarana Prasarana Pendidikan Formal di Kampung Lalang

No.	Nama	Jumlah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1.	PAUD	1	3 orang	30 orang
2.	TK	2	8 orang	40 orang
3.	SD	3	42 orang	360 orang
4.	SMP	1	12 orang	146 orang
5.	SMA	1	22 orang	125 orang
6.	MDA	2	10 orang	120 orang
7.	Pesantren	1	12 orang	135 orang

Sumber data : *Profil Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak terdapat 9 unit sarana dan prasarana pendidikan, yaitu PAUD berjumlah 1 instansi, Taman Kanak-kanak (TK) berjumlah 2 instansi diantaranya TK. Aisyah dan TK Sri Mahkota, Madrasah berjumlah 2 instansi, Pondok Pesantren Darul Qur'an satu instansi, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3 instansi diantaranya SD N 07, SD N 13 dan SD N 020 Lalang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 1 instansi yaitu SMP N 2, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 1 instansi yaitu SMA N 2. Karena banyaknya sarana dan prasarana pendidikan di Kampung Lalang inilah yang menambah pengetahuan anak-anak sehingga memperkuat minat orang tua untuk mengantarkan anak-anak mereka melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi di luar kota Siak untuk berkuliah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi sebelum lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan di Kampung Lalang ini banyak masyarakat Kampung Lalang yang telah berusia, secara formal ada yang tidak bersekolah dan ada yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan ada juga hanya tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk mengetahui keadaan pendidikan masyarakat Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat diperhatikan tabel berikut :³⁹

Tabel 2.5
Klasifikasi Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	82orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sudah masuk TK	54 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	431 orang
4.	Usia 18- 56 tahun yang tidak sekolah	106 orang
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	62 orang
6.	Tamat SD/Sederajat	380 orang
7.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	219 orang
8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	167 orang
9.	Tamat SMP/Sederajat	162 orang
10.	Tamat SMA/Sederajat	188 orang
11.	Tamat D-3/Sederajat	40 orang
12.	Tamat S-1/Sederajat	59 orang
13.	Tamat S-3/Sederajat	40 orang
Jumlah		1.950 orang

Sumber data : *Profil Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020*

Dari data di atas jelas bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kampung Lalang sangat bagus, hal ini dapat dilihat dari tingginya minat orang tua yang menyekolahkan anaknya dimulai dari TK bahkan sampai Perguruan Tinggi. Walau ada sebanyak 106 orang yang tidak pernah sekolah, 62 orang yang pernah SD tapi tidak tamat, 380 orang yang hanya tamat SD, 219 orang

³⁹ Pemerintah Kampung Lalang, *Op.Cit*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak tamat SMP, dan 167 orang yang tidak tamat SLTA, namun ada 40 orang yang menyelesaikan pendidikan sampai Perguruan Tinggi jenjang S-3 perkuliahan.

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan merupakan perkembangan yang diperoleh Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Dengan adanya sarana dan prasarana ini diharapkan dapat membantu dalam membentuk masyarakat dan menghadapi perkembangan masyarakat yang berkualitas.

E. Keagamaan

Dalam hal keagamaan masyarakat Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit 97% beragama Islam 3% beragama Budha dikarenakan penduduk yang pertama kali menempati kampung ini adalah penduduk china Tiongkok yang beragama Budha. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel berikut :

Tabel 2.6
Agama Masyarakat Kampung Lalang

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	900	969
2.	Budha	60	21
Jumlah		960 orag	990 orang

Sumber data : *Profil Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020*

Meskipun demikian masyarakat Kampung Lalang penganut agama Islam yang kuat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap dusun mempunyai Mesjid dan Mushalah yang dijadikan sebagai tempat beribadah, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan tempat sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya sarana dan prasarana ibadah yang memadai ini akan memacu semangat masyarakat dalam beribadah dan menciptakan kehidupan religious ditengah-tengah masyarakat. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.7
Sarana Prasarana Peribadatan Kampung Lalang

No.	Nama	Jumlah
1.	Mesjid	4 buah
2.	Mushallah/Surau	3 buah
3.	Gereja	-
4.	Klenteng	1 Unit

Sumber data : *Profil Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk beribadah yakni terdapat 4 mesjid dan 3 mushallah dan satu unit klenteng yang semuanya permanen.

F. Sosial dan Budaya

Kerajaan Siak adalah salah satu kerajaan yang ada di Provinsi Riau sebelum masa kemerdekaan. Pemerintahan kerajaan yang ada di Riau pada waktu itu mempunyai struktur dan gelaran pemegang pemerintahan tersendiri.⁴⁰ Pada masa Pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura terdapat 10 propinsi secara administrasi pemerintahan masuk dalam struktur

⁴⁰ Siak, Kajian Akademis Desa Adat Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan Kerajaan Siak. Kemudian pada masa penjajahan terjadi perubahan-perubahan dengan demikian lembaga masyarakat yang ada di Kabupaten Siak mempunyai kekhasan sesuai dengan sosial budaya sendiri.

Masyarakat Kampung Lalang secara keseluruhan adalah bersuku Melayu. Hal ini dapat dilihat bahwa dahulunya Kabupaten Siak itu adalah sebuah kerajaan yang mencapai masa keemasan saat pemerintahan Sultan kedua belas bernama Asy-Syaidi Asy- Qasim Tsani Abdul Jalil Syaifuddin, yang mempunyai komitmen kuat untuk memajukan Siak dengan landasan nilai-nilai Islami. Hal ini terungkap dalam pepatah yang mengatakan : “Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syara’ tumbuh dari kitabullah”⁴¹.

Oleh karena itu, maka seluruh nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat Melayu-Siak wajiblah merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Karenanya, semua nilai budaya yang dianggap belum serasi dan sesuai dengan ajaran Islam haruslah “diluruskan” dan disesuaikan dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu-Siak.

⁴¹ Tenas Affendy, *Op.Cit*, h. 25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Defenisi Waris

Secara etimologi Mawaris merupakan bentuk plural dari kata *Mirats* yang berarti warisan. Jika ditelusuri lebih dalam, kata ini merupakan bentuk *maf'ul* (objek) dari kata *وَرِثَ* – *يَرِثُ* yang artinya menguasai harta.⁴² Kata waris berasal dari kata *warisa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.⁴³ Kata *waritsa* adalah kata kewarisan yang digunakan dalam al-Qur'an dan memiliki beberapa makna :

- a) Mengandung makna “*mewarisi atau menerima warisan*”, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Maryam ayat 6 yang berbunyi :

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا⁴⁴

Artinya : “yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai". (QS. Maryam [19] : 6)

- b) Mengandung makna “*mengganti kedudukan*”, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Naml ayat 16 yang berbunyi :

⁴² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 496

⁴³ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 1.

⁴⁴ QS. Maryam (19) : 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُمِينُ ۝⁴⁵

Artinya : “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata". (QS. an-Naml [27] : 16)

Secara terminologi, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁴⁶

Terdapat beberapa pandangan para ahli mengenai hukum kewarisan diantaranya menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam bukunya *Fiqh Mawaris* pengertian ilmu waris adalah :

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَ مَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَرَثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ⁴⁷
Artinya : “ ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar pusaka yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.”

Amir Syarifuddin juga mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari

⁴⁵ QS. an-Naml [27] : 16

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), Cet-6, h.355

⁴⁷ Hasby ash-Sidiqy, *Op.Cit.* 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, dan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits.⁴⁸

Ilmu waris juga disebut *faraidh* (الفرائض), kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* (الفريضة) kata ini berasal dari kata *faradhu* (الفرض) yang artinya “ketentuan”, atau suatu bagian yang ditentukan.⁴⁹ Disebut dengan *ilmu faraidh* karena ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris. Sehingga ilmu *faraidh* atau ilmu waris didefinisikan oleh para ulama :

عِلْمُ الْفَرَائِضِ هُوَ فِقْهُ الْمَوَارِيثِ وَعِلْمُ الْحِسَابِ الْمُوصَّلِ لِمَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّ كُلَّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرَكَةِ

Artinya : “ Ilmu *faraidh* adalah ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka dan ilmu perhitungan yang menyampaikan untuk mengetahui secara khusus mengenai siapa saja yang mempunyai hak terhadap harta peninggalan.”⁵⁰

Menurut as-Syarbani pengertian ilmu *faraidh* adalah ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung : 1984) Cet, 1. h. 3

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 2

⁵⁰ Assaiyyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz Bin Abdullah, *Takmilah Jubdah al-Hadits fi Fiqhi al-Mawaris*, (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiah, 2012), h. 8-9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.⁵¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (a) sendiri memberi arti hukum kewarisan adalah : “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.”⁵² Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa ilmu waris yang biasa dikenal dengan ilmu *faraidh* adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak berhak mendapat bagian dan berapa besar masing-masing ahli waris mendapatkan bagian dari harta waris si mayit.

B. Dasar dan Sumber Hukum Waris

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan *fiqh mawaris* adalah *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif). Artinya, suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang memenuhinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi, apabila tidak ada seorang pun yang menjalani kewajiban itu, maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa. Sejalan dengan perintah Rasulullah SAW agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraidh*, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an. Rasulullah bersabda:

⁵¹ Mardini, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 2-3

⁵² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, “ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta : Presiden Republik Indonesia, 1991), h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروثنا الفضل بن عبد الجبارثنا النضر بن شميل أنبأ عوف بن أبي جميلة عن سليمان بن جابر الهجري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَ عِلْمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرِیْضَ وَ عِلْمُهَا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرُؤُ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَ يُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ إِنْتَانِ فِي الْفَرِیْضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا (أخرجه الحكيم)⁵³

Artinya : Abu al-Abbas Muhammad bin Ahmad al-Mahboubi mengabarkan kepada kami tentang warisan, al-Fadl ibn Abd al-Jabbar dan al-Nadr ibn Shamil, Awf ibn Abi Jamila dari Sulaiman bin Jaber al-Hijri dari Abdullah bin mas'ud r.a berkata : Bersabda Rasulullah - Shalallahu 'alaihi wasallam : *"Pelajarilah oleh kalian al-Qur'an, dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah (pula) ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang akan terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka."* (HR. Al-Hakim)

Hadis di atas menunjukkan bahwa ilmu *faraidh* merupakan cabang ilmu yang cukup penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena tidak jarang dijumpai bahwa naluriiah manusia memiliki kecenderungan materialistik, serakah, tidak adil, dan kadang dengan mudah mengorbankan kepentingan orang lain demi memenangkan hak-haknya sendiri. Maka di sinilah letak pentingnya kegunaan *ilmu faraidh*, karena itu wajib dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Agar di dalam pembagian warisan, setiap orang menaati dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an secara detail.

⁵³ Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburri, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai dasar hukum tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap berpedoman pada hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Adapun dasar hukum waris dalam KUHPerdara terdapat pada pasal 830 sampai dengan 1085 KUHPerdara yang intinya adalah bagian I tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d 851) : mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan semua piutang si yang meninggal."⁵⁴

Jelaslah bahwa dasar-dasar hukum di atas, mengindikasikan umat Islam harus melaksanakan peraturan-peraturan yang disyariatkan Islam yang ditunjuk oleh *nash*. Demikian pula dalam pembagian harta waris pusaka, merupakan suatu kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan syariat Islam dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Sumber-sumber hukum kewarisan Islam terdiri dari beberapa sumber di antaranya :

1. al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma'. Tidak ada hukum-

⁵⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur : Balai Pusaka, 2014), Cet-41, h. 222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an secara terperinci, seperti hukum-hukum waris sebagaimana berikut :

- a. Surah an-Nisa' ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^{٥٥} وَلِلَّذِينَ
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَتَاوَهُمْ نَصِيهِمْ^{٥٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدًا^{٥٥}

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. an-Nisa' [4] : 33)

- b. Surah an-Nisa' ayat 11

Al-Qur'an menegaskan secara jelas tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan *al-furud al-muqaddarah* atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa (*'asabah*), serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris, sebagaimana firman Allah SWT surah an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^{٥٦} فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً^{٥٦}
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^{٥٦} وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^{٥٦}
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ^{٥٦} إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ^{٥٦} فَإِنْ لَّمْ

⁵⁵ QS. an-Nisa' [4] : 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
الْأُشْدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa’ [4] : 11)

- c. Surah an-Nisa’ ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾

⁵⁶ QS. an-Nisa’ [4] : 11

⁵⁷ QS. an-Nisa’ [4] : 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. an-Nisa’ [4] : 58)

2. al-Sunnah

- Hadis dari Ibnu Abbas menurut riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim (*muttafaq ‘alaih*) yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ مُخْلَدٌ وَهُوَ الْأَشْبَعُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اُفْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلَأُولَى ذَكَرٍ (متفق عليه)⁵⁸

Artinya : Ahmad bin Shalih dan Makhlid bin Khalid menceritakan kepada kami, dan ini hadits Makhlad dan dia adalah al-Ashba mereka berkata Abd al-Razzaq memberi tahu kami, dari Ibn Tawus dari ayahnya Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw, bersabda : “Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

- Hadits dari Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ مَرَضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ -يَعُودُنِي، هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ، وَ قَدْ أَغْمِيَ عَلَيَّ، فَلَمْ أَكَلِمَهُ، فَتَوَضَّأُ، وَ صَبَّهَ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ،

⁵⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sunan Abu Daud*, (Iskandariah : Markas Nur Islam, ttb), juz, 6. h. 398. Tjm oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet-2, Jilid 2, h. 344

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ! وَلِي أَخَوَاتُ قَالَ:
فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ⁵⁹ : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; saya mendengar Ibnu Al Munkadir, bahwa ia mendengar Jabir berkata : Aku pernah sakit, lalu Rasulullah bersama Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki, saat itu aku tak sadarkan diri maka aku tidak berbicara kepadanya. Rasulullah kemudian berwudhu dan menyiratkan air wudhunya kepadaku, maka aku pun tersadar. Aku kemudian berkata, “ *Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan hartaku, karena aku hanya mempunyai saudara perempuan.*” Lalu turunlah ayat waris, “*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak.*” (QS. An-Nisaa’ [4] : 176 (HR. Abu Daud)

Pada prinsipnya al-Qur’an telah menjelaskan sumber hukum waris secara rinci. Setelah itu, Rasulullah mempraktekkan pembagian terhadap kasus-kasus tertentu yang muncul pada masa itu.

C. Asas-Asas Hukum Waris Islam.

Menurut al-Raghib, *asas* berasal dari kata *al-usul* kemudian berubah menjadi *al-asasu* atau *al-asas* yang berarti asal, dasar atau pangkal suatu bangunan. Selanjutnya, kata *asasa* berubah menjadi *asas* yang mengandung makna kaidah-kaidah yang harus dipertahankan karena ia berasal dari hati atau dasar. Kemudian kata tersebut menjadi bahasa Indonesia yang baku dan menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, apabila kata tersebut dihubungkan dengan kata hukum kewarisan Islam,

⁵⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Ashas al-Asyifistani, *Sunan Abu Daud*, (Mesir : tp, tt), juz. 4, Bab : Fil Kalalah, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dapat dirumuskan bahwa asas adalah alasan pendapat yang menjadi acuan dalam mencapai kebenaran Islam.⁶⁰

Sumber hukum waris Islam yang berasal dari wahyu mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum waris yang berdasarkan hasil ijtihad manusia. Oleh karena itu, karena bersumber dari wahyu maka asas-asas dalam hukum kewarisan Islam memperlihatkan bentuk karakteristik hukum kewarisan itu sendiri ada lima asas hukum Kewarisan Islam, yaitu :

1. Asas *Ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Dan cara peralihan harta ini disebut dengan *Ijbari*.

Kata *Ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hukum kewarisan Islam kata *Ijbari* memiliki arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sedirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.⁶¹ Asas ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu peralihan harta, jumlah harta yang berpindah, dan orang-orang yang akan menerima harta. Aspek peralihan harta

⁶⁰ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995), h. 71

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 19-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diperhatikan dalam firman Allah SWT surah an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا⁶²

Artinya : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”* (QS. an-Nisa' [4] : 7)

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan ada bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Oleh sebab itu harta yang ditinggalkan pewaris disadari atau tidak terdapat hak ahli waris.

Bahwa aspek jumlah harta yang berpindah tersebut sudah jelas ditentukan dalam al-Qur'an. Pewaris atau ahli waris tidak berhak menambah atau mengurangi. Oleh karena itu ahli waris wajib menerima bagian yang telah ditetapkan tidak boleh berkurang dan tidak boleh berlebih. Orang-orang yang menerima peralihan harta, yakni orang-orang yang berhak atas harta warisan sudah ditetapkan secara pasti. Manusia tidak memiliki otoritas sedikit pun untuk mengubah atau menukarnya.⁶³

⁶² QS. an-Nisa'(4) : 7

⁶³ Hajar M. *Op. Cit.* h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dilihat dari KUHPerdara, tampak perbedaannya bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUHPerdara ahli waris yang dimungkinkan menolak warisan, ia harus menerima segala konsekuensinya yang salah satunya adalah melunasi utang pewaris.⁶⁴

Hukum waris mempunyai asas *Ijbari*, berarti bahwa peralihan harta dari orang yang telah mati kepada ahli waris berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah SWT tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris. Ahli waris terpaksa menerima kenyataan peralihan harta kepadanya sesuai yang telah ditentukan. Pewaris (sebelum meninggal dunia) tidak dapat menolak peralihan hartanya kepada ahli waris, kecuali dalam batas tertentu yang telah ditetapkan oleh hadits.⁶⁵

2. Asas Bilateral.

Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung makna bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Karena hal itu berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat dari garis keturunan laki-laki dan perempuan dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan.⁶⁶

⁶⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Cet-1, h. 5

⁶⁵ Hajar M, *Op.Cit.* h. 31

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al-Qur'an surat ke 4 (an-Nisa') ayat 12 di atas menjelaskan bahwa bila pewaris seorang laki-laki, saudaranya yang laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan. Demikian pula jika pewaris seorang perempuan, saudaranya yang laki-laki dan perempuan berhak mewarisi. Sedangkan dalam surah an-Nisa ayat 176 yang berbunyi :

...إِنْ أَمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ...⁶⁷

Artinya : “jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak..” (QS. an-Nisa' [4] : 176)

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sementara ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya itu berhak mewarisi. Demikian pula bila seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, saudara laki-lakinya itu juga berhak mendapatkan warisan. Asas bilateral dalam hukum waris Islam berlaku pada semua garis hukum.⁶⁸

⁶⁷ QS. an-Nisa'(4) : 176

⁶⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), Cet-2, h. 6-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas Individual

Hukum Islam mengerjakan asas kewarisan Islam secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat bagian yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dalam jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadarnya masing-masing.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri, misalnya yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surah an-Nisa' ayat 7 di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku.⁶⁹

Dalam referensi lain menurut Syaikh Ahmad Syakir dalam bukunya *Mukhtashar Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa semuanya sama dalam hukum Allah SWT, mereka sama-sama mendapatkan hak waris meskipun mereka berbeda, seperti yang Allah SWT tentukan masing-masing dari mereka sesuai dengan kedekatannya kepada si mayat baik dari sisi kekerabatan, hubungan suami istri, maupun hubungan *wala'*,

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena sesungguhnya hubungan *wala'* itu merupakan daging yang kedudukannya sama dengan daging yang senasab.⁷⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap ahli waris memiliki hak untuk menerima warisan yang telah ditinggalkan, namun setelah terlaksananya hak-hak si mayat.

4. Asas Keadilan

Kata adil secara terminologi berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain adil juga berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan juga dititik beratkan kepada meletakkan sesuatu pada tempatnya.⁷¹


Jadi bila dilihat dari bagian yang diterima dalam warisan mungkin terdapat ketidak samaan, karena keadilan tidak hanya ditentukan pada jumlah penerimaan hak, tetapi dikaitkan dengan kebutuhan. Secara umum seorang laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban menafkahi baik dirinya, istrinya, anak-anaknya, maupun keluarganya, seperti ayah, ibu dan kerabat lainnya. Aturan ini ditegaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

⁷⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh Suharlan dan Suratman, (Jakarta : Darus Sunnah Pers, 2016), Cet-3, Jilid 2, h. 27.

⁷¹ Rahman Ritonga, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 1996), Jilid. 1, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... ⁷² 

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...” (QS. an-Nisa’ [4] : 34)

Bila dikaitkan antara pendapatan dengan kewajiban, akan terlihat bahwa laki-laki merasakan manfaat dari harta yang diterimanya, sama dengan manfaat yang dirasakan oleh perempuan.

Pada posisi yang sama, usia tidak menjadi faktor pembeda diantara ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan sementara memang terkesan tidak adil, karena orang dewasa dan anak-anak menerima hak yang sama. Akan tetapi peninjauannya tidak sementara atau ketika menerima hak saja, karena anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama dibandingkan dengan orang dewasa. Bila dihubungkan besarnya keperluan anak kecil, hasilnya bahwa keduanya sama-sama merasakan manfaat dari harta waris yang mereka terima inilah keadilan yang hakiki menurut konsep hukum Islam.⁷³

⁷² QS. an-Nisa’(4) : 34

⁷³ Hajar M, *Op.Cit.* h.39-40

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum warisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dan berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.⁷⁴

Asas kematian ini mempunyai kaitan yang erat dengan asas *ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dapat bertindak atas hartanya yang menyangkut dengan kemauan atau kehendaknya selama ia hidup. Namun demikian ia tidak mempunyai kebebasan untuk mengatur hartanya itu untuk penggunaan sesudah matinya. Kebebasan untuk bertindak dengan maksimal sepertiga harta maka tindakannya tidak dapat disebut kewarisan.⁷⁵

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata *waratsa* yang banyak terdapat dalam al-Qur'an. Kata *waratsa* ditemukan beberapa kali dalam ayat-ayat kewarisan, dari semua pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Jadi telah jelas

⁷⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.h.* 72

⁷⁵ Hajar M, *Op.Cit.* h. 41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa harta baru bisa dialihkan setelah pemiliknya meninggal dunia tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

D. Syarat dan Rukun Waris

Untuk membuktikan waris, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Dan syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagiannya berdiri sendiri, adapun rukun pembagian warisan ada tiga yaitu sebagai berikut :

1. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya *al-muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara *hakiki*, secara yuridis (*hukmi*), atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.⁷⁶
 - a. Mati *hakiki*, adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - b. Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, adakalanya keputusan itu disamakan dengan adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keyakinan bahwa orang yang diputuskan mati itu masih hidup.⁷⁷ Ini bisa terjadi dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* h. 28

⁷⁷ Wabah Az-Zuhaili, *Op.Cit.* h. 349

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu ia mengikat.⁷⁸

- c. Mati *taqdiri*, adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga bahwa orang tersebut telah meninggal, dunia maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.⁷⁹
2. *Al-Warits* atau ahli waris, ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.

Syaratnya pada saat meninggalnya *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Loc.Cit.* h. 28-29

⁷⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarrits* dan *al-warits* tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani' al-irts*). Harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, seayah atau seibu mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang menerima bagian karena *ahlul furudh*, ada karena *ashabah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjub*), serta ada yang tidak terhalang.⁸⁰ Uraian tentang halangan saling mewarisi akan dibahas pada pembahasan berikutnya.

3. *Al-Mauruts* atau *al-mirats* yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

E. Sebab-Sebab Menerima Waris

Dalam hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga, yakni kekerabatan, hubungan perkawinan dan kekuasaan (*al-wala'*):

1. Hubungan Kekerabatan (*al-qarabah*).

Muhammad Ali al-Shabuni dalam bukunya *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyah fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah* mengatakan :

“Sungguh keberadaan kaum perempuan sebelum datang sinar terang Islam, tidak diberi bagian warisan sama sekali,

⁸⁰ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah & Waris*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

argumentasinya, mereka tidak bisa dan tidak mampu berperang. Orang-orang Arab mengatakan, “Bagaimana kami memberi bagian kepada orang yang tidak bisa mengendarai kuda, tidak bisa membawa pedang, dan tidak bisa memerangi musuh”. Maka mereka menolak memberi mereka bagian warisan, seperti halnya mereka menolak memberi bagian kepada anak-anak kecil.”

Islam datang untuk memperbaharui dan merevisinya, kedudukan laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun adalah sama, mereka sama-sama diberikan hak untuk dapat mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatannya jelas dan membolehkan. Artinya ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Ada kalanya menghalangi (*menghijabnya*) secara keseluruhan, ada kalanya menghalanginya itu hanya sekedar mengurangi bagian ahli waris yang terhijab.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ⁸¹

Artinya : “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada

⁸¹ QS. al-Anfal (8) : 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. al-Anfal [8] : 75)

Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan. Maka meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika dapat dinyatakan sebagai ahli waris maka ia berhak menerima bagian. Warisan karena nasab mencakup hal-hal sebagai berikut :⁸²

- a. Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan;
- b. Ayah dan ayah mereka juga ibu, ibu dan ibunya dan ibu dari ayah;
- c. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah, seibu, dan sekandung.
- d. Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.

2. Hubungan Perkawinan (*al-mushaharah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami istri. Perkawinan sah adalah perkawinan yang mana syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

⁸² Wabah az-Zuhaili, *Op.Cit.* h. 350

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum perkawinan di Indonesia memberi kelonggaran yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukanlah ketentuan administrasi, akan tetapi ketentuan hukum agama. Tetapi harus diakui bahwa ketentuan administrasi ini, merupakan sesuatu yang penting (*urgen*), karena dengan bukti-bukti pencatatan administratif inilah, suatu perkawinan memiliki ketentuan hukum.⁸³

Sebab apabila tidak ada bukti tertulis, bisa saja ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada karena ada maksud ingin menguasai harta warisan si mayit. Tentu hal ini akan sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan warisan.

Bahwa di antara kedua belah pihak telah berlangsung *aqad* nikah yang sah, *aqad* nikah yang sah dengan meninggalnya salah satu pihak, pihak yang hidup lebih lama sudah berstatus sebagai ahli waris. Termasuk pula dalam status perkawinan adalah istri-istri yang diceraikan *raj'i*, yaitu cerai yang mana suami lebih berhak untuk merujuknya ketimbang orang lain, yaitu cerai pertama dan kedua selama dalam masa tunggu (*'iddah*). Jadi jika istri yang diceraikan *raj'i* selama dalam masa-masa tunggunya, sekiranya suaminya masih hidup suaminya adalah yang paling berhak merujuknya.

⁸³Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memerdekakan Hamba Sahaya atau budak (*Al-Wala'*)

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk sebab mewariskan ini sudah jarang ditemukan pada masa sekarang bahkan tidak ada sama sekali. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut *al-mu'tiq* dan jika perempuan *al-mu'tiqah*. Wali penolong disebut *maula* dan orang yang ditolong disebut *mawali*.

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Namun pada masa sekarang ini istilah hamba sahaya sudah tidak ada lagi semenjak dihapusnya perbudakan yang merupakan salah satu keberhasilan Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *al-mu'tiq* dan *al-mu'tiqah* salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.

F. Faktor Penghalang Waris Menurut Hukum Islam

Faktor penghalang untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-'irts*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarrits*. Hal-hal yang dapat menghalangi disepakati menurut para ulama ada tiga .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap *al-muwarrits*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi hartapeninggalan yang diwarisi. Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mayit adalah sabda Rasulullah, di antaranya adalah riwayat Ahmad dari ibn ‘Abbas :

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهُوَ عَمْرُو بَرْقٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ». وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ أَوْ وَلَدِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ»⁸⁴ (رواه البيهقي)

Artinya : Abu Bakar ibn al-Harith al-Faqih memberitahu kami, Abu Sheikh Asbahani memberitahu kami, Mohammed bin jaafar memberitahu kami Abbas ibn Yazid memberitahu kami Abdul Razzaq memberitahu kami Muammar dari Abdul Razzaq dan dia amru barqi dari ikrimah dari Abbas berkata “*Rasulullah saw bersabda : “Barang siapa membunuh seorang korban, maka sesungguhnya ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. “Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan.”* (HR. Al-Baihaqi)

Para ulama berbeda pendapat dalam hal jenis pembunuhan mana yang menghalangi si pembunuh untuk mewarisi harta

⁸⁴ Abu Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, (Beirut : Dar al Fikr, 1925), juz. 10, h. 220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peninggalan korban, *Fuqaha* aliran Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi (*mawani'ul iris*) ada empat macam, yakni :

- a. Pembunuhan yang dapat diberlakukan *qishas*, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti pedang, golok, atau benda tajam lain yang diduga dapat digunakan untuk membunuh.

Jika ahli waris membunuh pewarisnya secara dzalim, maka disepakati bahwa dia tidak mewarisinya, Rasulullah bersabda :

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ حَدَّثَ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا (رواه البيهقي)⁸⁵

Artinya : Bersabda Rasulullah Saw : “Pembunuh tidak berhak mendapat apa-apa jika tidak ada pewaris yang lain maka pewarisnya orang terdekat darinya, dan pembunuh tidak dapat mewarisi apapun.” (HR. Abu Daud)

- b. Pembunuhan yang hukumannya berupa *kafarat*, yaitu pembunuhan yang mirip sengaja (*syibhul 'amdi*), seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa

⁸⁵ Abu Bakar ahmad bin al-husaini Ali al-Baihaqi, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai niat dan tujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi orang yang dipukul itu meninggal dunia, maka pembunuhan yang tidak sengaja bertujuan membunuh tersebut, dikenakan *kafarat*.

- c. Pembunuhan khilaf (*qathul khattha'i*) pembunuhan ini dapat dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, khilaf maksud, misalnya seseorang menembakkan peluru pada sasaran yang dikira binatang, dan mengenai sasaran seorang manusia lalu meninggal. *Kedua*, khilaf tindakan, seperti seorang menebang pohon lalu mengenai keluarganya yang melihat dari bawah hingga tewas.⁸⁶
- d. Pembunuhan dianggap khilaf (*al-jar majra al-khatha'*), misalnya seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini si pembawa bawaan itu dikenakan *kafarat*.

Selanjutnya Ulama *Hanafiyah* menjelaskan pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya, ada empat yaitu :

- a. Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*)
- b. Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang disertai tugas untuk membunuh si terhukum
- c. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum

⁸⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.h.* 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pembunuhan karena 'uzur, seperti pembelaan diri.⁸⁷

Ulama mazhab *Syafi'iyah* menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan. Jadi seorang algojo misalnya, yang melakukan tembakan terhadap terhukum yang masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terpidana, kendati pun tidak ada ahli waris lainnya.

Selain itu, diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang mana perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling mewarisi. Dengan demikian, tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya penghalang untuk dapat mewarisi.

2. Berlainan Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarrits*, salah satunya beragama Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam *muwaritnya* beragama Kristen atau sebaliknya. Demikianlah ulama sepakat, apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian pula tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama,

⁸⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : al-Ma'arif, 1981), h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab *Sunny* dan yang lain *Syi'ah*.⁸⁸ Dasar hukumnya dijelaskan dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 141 yang berbunyi :

...وَلَنَجْجَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا⁸⁹

Artinya : "...Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman"(QS. an-Nisa' [4] : 141)

Nabi SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian. Sebagaimana Nabi bersabda :

عَنْ شُعَيْبٍ, عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارِثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (متفق عليه)⁹⁰

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* h. 35

⁸⁹ QS. an-Nisa' [4] : 141

⁹⁰ Abi al-Fadhal, *Musnad al-Jami'*, (ttp: tp, tt), juz 26, h. 209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Dari Abdullah bin amru, dia berkata : Rasulullah Saw bersabda, "Tidak boleh saling mewarisi antara dua pemeluk agama yang berbeda. (Muttafaqun 'alaih)*

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan *al-muwarrits* berbeda agama atau tidak, adalah pada saat *al-muwarrits* meninggal karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi jika ada seorang Muslim meninggal dunia, kemudian terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu beliau masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mayit. Dan bukan pada saat pembagian warisan yang menjadi pedoman demikian kesepakatan para ulama.⁹¹

Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang mewarisi. Dasarnya adalah bahwa masing-masing agama mereka mempunyai syari'at sendiri-sendiri, seperti disyari'atkan firman Allah SWT surah al-Maidah ayat 48 yang berbunyi:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا... ﴿٤٨﴾⁹²

Artinya : *"Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang".⁹³ (QS. al-Maidah [5] : 48)*

⁹¹ *Ibid*, h. 36

⁹² QS. al-Maidah [5] : 48

⁹³ QS. al-Maidah (5) : 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai orang murtad (orang yang keluar dari agama Islam) para ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilah*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.⁹⁴ Karena itu, meskipun dalam syari'at Islam bahwa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke *Bait al-Mal* harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.⁹⁵

3. Perbudakan (*al-'abd*)

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak) mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 75 :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ... ﴾⁹⁶

Artinya : “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatuapun...” (QS. al-Nahl [16] : 75)

⁹⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidin, 1981), h.16

⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* h. 38

⁹⁶ QS. an-Nahl (16) : 75



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sangat tidak menyetujui adanya perbudakan sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*) dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam.

G. Ahli Waris dan Bagiannya.

KHI menjelaskan tentang pengertian ahli waris pada buku III tentang hukum kewarisan dalam pasal 171 ayat c yang berbunyi :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁹⁷

Dan dijelaskan pula tentang harta waris pada pasal 171 ayat e yang berbunyi :

“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.⁹⁸

Warits adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan yang ditinggal oleh pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sistem kewarisan ahli waris ini terdiri dari dua golongan, yaitu *dzawu al-furudh* dan ahli waris *‘ashabah*. Ahli waris *Asbabul furudh* adalah ahli

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.* h. 81

⁹⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan secara pasti bagian yang akan diterimanya dan telah ditetapkan secara pasti dalam nash dan ijma' para ulama.⁹⁹

Sedangkan ahli waris *ashobah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti dalam pembagian warisan karena ia bisa mendapatkan seluruh harta bila tidak ada ahli waris *dzawu al-furudh* atau menerima sisa harta setelah dikeluarkan untuk *dzawu al-furudh*.

1. Ahli Waris *Asbabul Furudh*

Ahli waris *asbabul furudh* ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *Asbabul Furudh Nasabiyah* dan *Asbabul Furudh Sahabiyah*. *Asbabul Furudh Nasabiyah* adalah orang yang berhak menerima harta warisan dikarenakan adanya hubungan keturunan dengan orang yang meninggal dunia, yaitu selain suami atau istrei. Sedangkan *Asbabul Furudh Sahabiyah* adalah orang yang berhak menerima harta warisan dikarenakan adanya suatu sebab perkawinan dengan orang yang meninggal dunia yakni mereka yang suami atau istri.¹⁰⁰

Ahli waris *asbabul furudh* terbagi kepada 12 orang, mereka itu adalah :

- a. Anak perempuan
- b. Anak laki-laki
- c. Cucu Perempuan

⁹⁹ Fathur Rahman, *Op.Cit*, h. 34.

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Saudara perempuan sekandung
- e. Saudara perempuan seayah
- f. Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu
- g. Ibu
- h. Nenek dari ayah atau ibu
- i. Kakek dari ayah
- j. Suami
- k. Istri
- l. Ayah.

2. Ketentuan Bagian Dzawul Furudh

- a. Ketentuan bagian ayah.

Jika tidak terhalang ayah mendapatkan bagian 1/6 apabila bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan mendapatkan 1/6 dan *ashabah* apabila bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki,¹⁰¹ dan menjadi *ashabah* apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Ketentuan ini terdapat dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ...¹⁰²

¹⁰¹ Moh. Anwar, *FARAILDL (hukum waris dalam Islam) dan masalah-masalahnya*, (Surabaya : al-Ikhlas, 1981), h. 58

¹⁰² QS. an-Nisa' (4) : 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “...Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...” (QS. an-Nisa’ [4] : 11)

b. Ketentuan bagian ibu

Jika tidak terhalang ibu mendapatkan 1/6 apabila bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara baik sekandung, atau seayah ataupun seibu saja atau lebih, mendapat 1/3 apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki, ataupun dua orang saudara seperti disebutkan sebelumnya, mendapat 1/3 ketinggalan apabila bersama dengan ayah beserta suami atau istri.

Menurut Ibnu Abbas bahwa yang dapat merubah bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6 adalah tiga orang saudara, bukan dua orang saudara atau lebih. Tetapi menurut Ali r.a dan Ibnu Mas’ud dan kebanyakan ulama, sebagaimana ketentuan di atas. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ...

103 

Artinya : “...Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...” (QS. an-Nisa’ [4] : 11)


c. Ketentuan bagian kakek

Jika tidak terhalang kakek (ayah dari ayah) ketentuannya tidak jauh berbeda dengan ayah, karena kedudukannya adalah sebagai pengganti ayah jika ayah tidak ada. Kakek mendapatkan 1/6 jika bersama dengan cucu atau anak laki-laki.

d. Ketentuan bagian suami

Suami mendapatkan 1/4 jika bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki dan mendapatkan 1/2 apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.¹⁰⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 12 yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ

لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ...  105

Artinya : “ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

¹⁰³ QS. an-Nisa’(4) : 11

¹⁰⁴ Moh. Anwar, *Op.Cit.* h. 60-61

¹⁰⁵ QS. an-Nisa’ [4] : 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya...” (QS. an-Nisa’ [4] : 12)

e. Ketentuan bagian isteri

Jika tidak terhalang istri mendapatka 1/8 apabila bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki, dan mendapatkan 1/4 jika tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.¹⁰⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 12 yang berbunyi :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ...¹⁰⁷

Artinya : “...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”... (QS. an-Nisa [4] : 12)

f. Ketentuan bagian anak perempuan

Jika tidak terhalang anak perempuan mendapat 1/2 kalau hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki, mendapat 2/3 bagian, jika ada dua orang anak perempuan atau lebih serta tidak ada anak laki-laki. Dan menjadi *ashabah* jika bersama anak laki-laki tetapi bagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan.¹⁰⁸ Sebagaimana

¹⁰⁶ Moh. Anwar, *Loc.Cit.* h. 61

¹⁰⁷ Al-Qur’an, *Loc.Cit.* 4 : 12

¹⁰⁸ Moh. Anwar, *Op.Cit.* h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ¹⁰⁹

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...” (QS. an-Nisa’ [4] : 11)

g. Ketentuan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki

Jika tidak terhalang oleh anak laki-laki dan dua anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/2 jika seorang diri tanpa cucu laki-laki dari anak laki-laki, mendapat 2/3 jika lebih dari seorang tanpa cucu laki-laki dari anak laki-laki, mendapatkan 1/6 jika bersama seorang anak perempuan dan tanpa cucu laki-laki dari anak laki-laki, menjadi *ashabah bil ghair* jika bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki.

h. Ketentuan bagian saudara perempuan sekandung

Jika tidak terhalang oleh ayah dan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung mendapatkan 1/2 jika hanya seorang diri tanpa saudara laki-laki sekandung, mendapatkan 2/3 jika lebih dari seorang tanpa saudara laki-laki sekandung, menjadi *ashabah bil ghair* jika bersama saudara laki-laki sekandung, dan menjadi *Ashabah ma'alghair* jika bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki.

¹⁰⁹ QS. an-Nisa’ [4] : 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 176 yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... ¹¹⁰

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...” (QS. an-Nisa' [4] : 176)

i. Ketentuan bagian saudara perempuan seayah

Jika tidak terhalang oleh ayah, anak laki-laki atau cucu laki-laki, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan sekandung jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan, atau oleh saudara laki-laki seibu – seayah.

Saudara perempuan seayah akan mendapatkan 1/2 jika seorang diri tanpa saudara laki-laki seayah, mendapat 2/3 jika lebih dari seorang dan tanpa saudara laki-laki seayah, mendapatkan 1/6 jika bersama seorang saudara perempuan sekandung tanpa saudara laki-laki seayah, menjadi *Ashobah bil ghair* jika bersama saudara laki-laki

¹¹⁰ QS. an-Nisa'(4) : 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seayah, dan menjadi *Ashabah ma'al ghair* jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

- j. Ketentuan bagian saudara laki-laki atau saudara perempuan Seibu

Jika tidak terhalang oleh ayah, kakek, anak, atau oleh cucu dari anak laki-laki, maka saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan jika mereka seorang diri, dan mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika mereka lebih dari seorang.

3. Ahli Waris *Ashabah*

Ashabah artinya menghabisi harta, menurut pengertian *faraidh ashabah* ialah orang yang boleh mengambil harta pusaka seluruhnya bila ia hanya sendirian saja, dan boleh mengambil sisa harta warisan jika harta tersebut telah selesai dibagi kepada masing-masing ahli waris. '*ashabah* ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *ashabah bi nafsih* (dengan sendirinya), artinya *ashabah*nya bukan disebabkan adanya waris yang lain, tetapi sudah dari asalnya mereka menjadi ahli waris *ashabah*.¹¹¹ Mereka terdiri dari 11 orang yaitu :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Saudara laki-laki sekandung
- 5) Saudara laki-laki seayah
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

¹¹¹Moh. Anwar, *Op.Cit.* h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 8) Paman sekandung
- 9) Paman seayah
- 10) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 11) Anak laki-laki dari paman seayah.

- b. *ashabah bil ghair* , yaitu waris *ashabah* yang *ashabah*nya itu karena tertarik oleh waris *ashabah* yang lain. Seperti *ashabah*nya anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan, karena ditarik oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan saudara laki-laki, yang asal mula mereka adalah ahli waris *dzawil furudh*.
- c. *ashabah ma'al ghair*, yaitu waris *ashabah* yang *ashabah*nya itu karena bersama-sama dengan waris *dzawil furudh* yang lain misalnya saudara perempuan dapat menjadi *ashabah* karena bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.¹¹²

H. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹¹³ Hak dan harta benda yang diwariskan itu sebelum dibagi kepada ahli waris, hendaklah dilakukan beberapa hal berikut:

1. Perawatan dan pengurusan jenazah

¹¹² Ibid. h. 75

¹¹³ M. Syarif, *Membagi Harta Warisan*, (Pekanbaru:Yayasan Pusaka Riau, 2009), Cet-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan yang masih terutang bila pewaris dirawat di rumah sakit, serta keperluan pemakaman yang menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit sejak wafatnya diantaranya biaya memandikan, pembelian kain kafan sampai dengan jenazahnya diletakkan di liang lahad. Biaya pemakaman dan lainnya bila yang meninggal tidak mempunyai harta maka biaya ini ditanggung oleh kerabat yang wajib menafkahnya.

Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayit baik dari segi kemampuan maupun jenisnya.¹¹⁴

2. Membayar Hutang

Hutang seseorang yang meninggal dunia wajib dilunasi dari harta yang ditinggalkannya, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah berupa Zakat, Kifarat dan Nazar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَ عَنْهُ (رواه احمد و الترمذی)¹¹⁵

Artinya : “Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda : Seorang mukmin yang meninggal dunia tersangkut dengan hutangnya, hingga dibayar untuknya.” (HR. Ahmad dan Thurmizi)

¹¹⁴ Fatchur Rahman, *Op.Cit.* h. 43

¹¹⁵ Mujiddin Abu al-Saadat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazur Ibnu al-Asir, *Jami' al-Ushul al-Hadits Rasul*, (ttp : Maktabah al-Hawali, tt), juz 11, Cet. 1, h. 181, Trj. Abdu al-Qadar arnu'ta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembayaran hutang didahulukan dari pada melaksanakan wasiat, hikmah mendahulukannya adalah perhatian Islam terhadap utang itu dan tidak mengabaikannya, sebab hutang mirip dengan warisan yang harus diambil tanpa kompensasi, oleh karena itu para ahli waris harus mengeluarkannya.¹¹⁶

3. Menunaikan wasiat si mayit

Secara etimologi mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wasiat adalah hak yang dianjurkan oleh agama kepada seseorang atas harta bendanya terutama untuk ahli waris yang terhijab (terhalang) dan untuk kemaslahatan umat. Dalam hukum Islam, sumber hukum yang mengatur tentang wasiat terdapat dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَلَدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ¹¹⁷

Artinya : *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”* (QS al-Baqarah [2] : 180)

¹¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 367

¹¹⁷ QS. Al-Baqarah [2] : 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan sumber hukum tentang wasiat sebagaimana tersebut di atas, para ahli berbeda pendapat tentang status hukum wasiat ini. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat tidak *fardhu'ain*, baik kepada orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan atau kepada mereka yang tidak menerima warisan.

I. Waktu Pembagian Warisan

Masalah kewaisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan dalam al-Qur'an, *nash-nash* yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran. Berkaitan dengan perilaku masyarakat Jahiliyah surah an-Nisa' ayat 19 memberi penegasan tentang kedudukan perempuan yang ditinggal oleh suaminya yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

118 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah

¹¹⁸ QS. an-Nisa' [4] : 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. an-Nisa’ [4] : 19)

Seandainya ketentuan pembagian waris diserahkan kepada akal pikiran manusia, menurut Syaikh as-Sa’di, niscaya ketentuan tersebut benar-benar akan menimbulkan kerusakan, dan hanya Allah saja yang mengetahui besarnya kerusakan tersebut. Lantaran kedangkalan dan kekurangtahuan akal manusia terhadap perkara yang terbaik, di setiap masa dan tempat.¹¹⁹

Tidak mengetahui apakah anak-anak atau dua orang tua yang lebih mendatangkan manfaat untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia mereka. Warisan merupakan hak bagi para pewaris yang menjadi bagiannya, Allah sudah menunjukkan pembagiannya secara langsung. Penundaan hanya kan melahirkan kezhaliman kepada pemilik hak tersebut. Apalagi pemilik hak tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang belum tercukupi. Selain itu, terhadap harta peninggalan dapat memungkinkan terjadinya perubahan harga atau nilai yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Terhadap waktu pembagian warisan menurut al-Qur’an tidak diatur secara jelas namun secara tersirat Islam mengajarkan agar menyegerakan dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Imran ayat 133 yang berbunyi :

¹¹⁹ Rahmawati, “Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, No. 3 (2016), h 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

Artiya : “dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,” (QS. an-Nisa’ [4] : 133)

Menurut Quraish Shihab, makna dari ayat di atas yaitu bersegeralah untuk melaksanakan amal saleh, agar kalian mendapatkan ampunan yang besar dari Allah atas dosa-dosa kalian. Juga, agar kalian mendapatkan surga yang amat luas, seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah dan siksa-Nya. Dengan adanya ayat ini dapat memperkuat pernyataan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan maghfirah Allah harus disegerakan, karena hal tersebut termasuk perintah Allah.

Melaksanakan hukum waris Islam merupakan salah satu kewajiban masyarakat muslim. Makna ayat-ayat tentang waris sudah sangat jelas dan rinci, demikian pula tentang kapan seseorang mendapatkan bagian-bagiannya atau orang yang sama sekali tidak memperoleh harta waris karena terhalang sebab alasan tertentu. Kemudian ketentuan-ketentuan tersebut dipertegas oleh firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 13-14 yang berbunyi :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِيْدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ

120  مُهِيْنٌ

Artinya : “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.” “dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”(QS. an-Nisa’ [4] : 13-14)

Ayat di atas menegaskan, bahwa seseorang yang melaksanakan segala sesuatu yang merupakan perintah Allah dan Rasulullah akan mendapatkan balasan akhirat berupa kemenangan yang kekal. Sedangkan yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulullah maka akan mendapatkan balasan akhirat yang sangat hina. Dalam hal ini ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang wajib dipelajari yang harus dilakukan oleh umat muslim.

Kaitannya terhadap waktu pelaksanaan pembagian harta warisan termasuk salah satu perintah yang ada dalam ilmu *faraidh* tersebut. Hukum waris memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidakberalih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup,¹²¹

¹²⁰ QS. an-Nisa’ [4] : 13-14

¹²¹ Rahmawati, *Op.Cit.* h. 9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waktu pembagian waris Islam menurut KHI (Impres N0. 1 Tahun 1991), ketentuan waris Islam menganjurkan pembagian warisan harus menyegerakan untuk dilaksanakan karena, dikhawatirkan terjadi berbagai konflik internal dalam keluarga atau harta warisan yang nilai atau jumlahnya tidak akan sama apabila tidak disegerakan. Sebab harta peninggalan biasanya tidak hanya berupa uang saja, namun bisa terdapat tanah atau bangunan atau barang yang memiliki nilai.

Dengan adanya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum kewarisan Islam terjadi apabila pewaris dinyatakan meninggal dunia dan memiliki hak untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak untuk menjadi ahli waris terhadap bagiannya yang telah ditentukan.¹²²

J. Penundaan Pembagian Waris

1. Pengertian Penundaan

Istilah Penundaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menunda.¹²³ Sedangkan pembagian menurut KBBI adalah, proses, cara, perbuatan membagi.¹²⁴ Adapun harta waris adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

¹²² *Ibid*

¹²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Cet-3, h. 86

¹²⁴ *Ibid*, h. 1224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e harta waris adalah harta bawaan yang ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹²⁵

Yang dimaksud dengan penundaan pembagian harta warisan adalah menunda atau mengakhirkan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun ditunda sampai batas waktu tertentu, yaitu menunggu ahli waris yang ditinggalkannya telah dewasa, mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada harta orang tuanya lagi.¹²⁶

Dalam hukum Islam tidak ada *nahs* yang secara tegas melarangnya namun mengakibatkan dikesampingkannya *nash* yang pasti dari syari'at Islam yaitu dalam hukum kewarisan Islam jika terjadi kematian maka harta yang ditinggalkan secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya. Jadi jika terjadi penundaan atau penangguhan ini apabila dilihat dari asas kewarisan Islam yaitu Asas *Ijbari*, maka hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki bahwa pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah terjadinya kematian.

¹²⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, ... h. 81

¹²⁶ Dwi Putra Jaya, *Op.Cit*, h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, yang dikehendaki dari maksud judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan” adalah kebiasaan masyarakat Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang melakukan penundaan pembagian harta warisan, berselang waktu semenjak dari meninggal dunianya *muwarris* sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain setelah *muwarris* meninggal harta warisan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan bisa saja penundaan itu sampai bertahun-tahun.

2. Faktor Penundaan Waris dan Upaya dalam Mengatasi Dampak Negatifnya

a. Faktor Penundaan Pembagian Harta Waris :

- 1) Penundaan atas dasar kesepakatan setiap ahli waris, terjadi jika kesepakatan penundaan pembagian warisan disepakati oleh semua ahli waris yang ditinggalkan pewaris.
- 2) Penundaan atas dasar menegakkan rumah tangga yang terkecil, Jika terjadi semua ahli waris telah berkeluarga dan mempunyai kehidupan yang layak.
- 3) Penundaan atas dasar sudut waktu berselangnya anak-anak mencapai usia dewasa, yakni menunggu anak yang belum mampu (mentas) atau belum bisa hidup mandiri dan beranjak dewasa. Maka pembagian warisan ditunda sampai si anak beranjak dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor penundaan pembagian harta warisan menurut Ter Haar, belum terbaginya harta warisan memang disediakan untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan material keluarga. Dan menurut Hilman, tertundanya pembagian harta waris disebabkan masih adanya salah satu dari orang tua, harta peninggalan terbatas, pewaris tidak memiliki keturunan, para ahli waris belum dewasa, belum ada ahli waris pengganti, belum ada ahli waris yang berhak, dan belum diketahui hutang piutang.¹²⁷

Sementara Amir Syarifuddin mengatakan tidak dibaginya harta warisan disebabkan karena tidak ada yang pantas dibagi, karena harta tidak dapat dibagi-bagi secara terpisah, karena memang ahli waris tidak menginginkan harta tersebut dibagi secara terpisah.

b. Dampak Negatif atas Penundaan Pembagian Waris

Terjadinya berbagai kasus kewarisan di Pengadilan Agama disebabkan banyaknya harta peninggalan yang tidak jelas, hilangnya data harta peninggalan tersebut menyebabkan tidak tercatatnya ukuran luas dan jumlah harta peninggalan, dan juga tidak jelasnya yang mana harta bawaan suami istri, mana harta bersama.

Bahkan dari ketidakjelasan harta peninggalan dapat memberikan peluang kepada ahli waris yang lemah imannya untuk

¹²⁷ *Ibid*, h. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanipulasi data harta peninggalan tersebut, dan juga bisa menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan sehingga menyebabkan putusnya hubungan silahturrahmi.¹²⁸

Di antara alasan-alasan diatas, yang merupakan alasan yang paling kuat dari penundaan/penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut ditunda karena para ahli waris menghendaki kelangsungan hidup janda (istri pewaris) atau duda (suami pewaris) dan anak-anak pewaris yang belum dewasa (belum mentas) dan belum bisa menghidupi dirinya sendiri. Apabila harta warisan tersebut dibagi secepatnya setelah pewaris meninggal dunia akan mengganggu kelangsungan hidup mereka, dan mereka bergantung dari hasil harta warisan tersebut.

Bagi anak-anak pewaris yang masih kecil, sangatlah tidak mungkin untuk menghidupi dirinya sendiri tanpa menggunakan harta orang tuannya sedangkan ia belum bekerja. Jadi dengan ditundanya pembagia harta warisan tersebut, janda dan anak pewaris yang belum mentas dapat tetap hidup layak seperti ketika pewaris masih hidup.

Biasanya pelaksanaan pembagian harta warisan ini ditunda sampai anak yang belum dewasa telah mampu menghidupi dirinya sendiri. Agar anak kecil tersebut kelak akan menjadi anak yang mandiri, bisa bekerja paling tidak untuk dirinya sendiri, tidak bergantung pada saudaranya atau orang lain untuk sampai ketahap

¹²⁸ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu anak-anak tersebut membutuhkan biaya untuk keperluan hidupnya. Dengan ditundanya pembagian warisan ini, diharapkan kehidupan rumahtangga yang ditinggalkan tidak akan mengalami banyak perubahan, terutama bila yang ditinggalkan adalah janda, dia akan tetap bisa melangsungkan hidupnya seperti ketika suaminya masih hidup dengan harta warisan tersebut.

Dapat kita lihat bahwa penundaan akan menyebabkan perselisihan dan putusnya hubungan silahturrahim antar keluarga karena sebagian mereka merasa terdzalimi oleh saudara dan keluarganya sendiri. Selain itu penundaan pembagian ini juga akan mempersulit pada masa yang akan datang apalagi jika penundaan itu sampai bertahun-tahun, mungkin saja akan terjadi sebagian ahli waris ada yang meninggal dunia.¹²⁹

Atau akan menyebabkan terjadinya penyusutan nilai harta warisan tersebut karena terlalu lamanya tidak dibagi maka akan semakin sulit untuk menghitungnya secara benar dan akurat. Jadi berikut dijelaskan beberapa cara mengatasi dampak negatif dari hilangnya data harta peninggalan, yaitu :

- 1) Pencatatan harta peninggalan
- 2) Penerapan Daluarsa dalam pembagian harta warisan
- 3) Cara pembagian harta warisan yang daluwarsa :

¹²⁹ Dwi Putra Jaya, *Op.Cit.* h. 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Daluwarsa berlaku terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun tidak ada pengampu warisan itu, selama ahli waris masih mengadakan perundingan mengenai warisannya.
- b) Daluwarsa berlaku terhadap siapa saja, kecuali terhadap mereka yang dikecualikan oleh undang-undang. Dan daluwarsa tidak dapat mulai berlaku atau berlangsung terhadap anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

3. Kedudukan Harta Waris yang Tertunda dan Pengurusannya :

a. Penguasaan Janda

Maksudnya adalah jika suami meninggal sedangkan anak-anaknya belum dewasa maka yang mengurus atau yang bertanggung jawab atas harta warisan adalah janda atau istri orang yang meninggal.¹³⁰

b. Penguasaan Anak

Terjadi jika anak pewaris sudah tidak mempunyai ayah atau ibu lagi sehingga harta warisan siurusi oleh saudara tertua yang ada itupun jika sudah dewasa, apabila belum dewasa maka menjadikan saudara sebagai pengampu dari anak ini.¹³¹

¹³⁰ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), h.

¹³¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penguasaan Keluarga

Apabila harta yang ditinggalkan oleh pewaris bukan berupa uang misalnya perusahaan, tanah, kendaraan, maka harta ini dikuasai oleh semua anggota keluarga (ahli waris) secara bersama-sama.

4. Pemilikan Bersama pada Harta Waris yang belum Dibagi

Pada harta warisan yang belum dibagi dalam Kitab Fiqh, pemilikan bersama disebut *Syirkah*. Kata *Syirkah* berasal dari bahasa Arab secara etimologi diambil dari *masdar Syaarik* yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. *Syirkah* terbagi menjadi tiga :

- a. *Syirkah Ibahah*, yaitu suatu perkongsian yang membolehkan manusia untuk mengambil manfaat bersama-sama terhadap suatu objek yang belum diusahakan orang lain, seperti padang rumput, api dan air.
- b. *Syirkah Al Milk*, yaitu perkongsian yang terjadi antara dua orang atau lebih atas sesuatu sebab dari beberapa sebab pemilikan harta, seperti pembelian, penerimaan, hibah, wasiat, sedekah, atau penerimaan warisan dari beberapa ahli waris.
- c. *Syirkah Al Uqud*, yaitu perkongsian yang dibentuk berdasarkan aqad antara dua orang atau lebih terhadap modal keuntungan, atau berdasarkan keuntungan saja tanpa modal. Dalam sebuah hadi dijelaskan bahwa persekutuan yang dilakukan dengan penuh kejujuran akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberkahi Allah, dan yang dilakukan tanpa kejujuran akan mendapat murkanya.

Suami istri bersama anak-anaknya sebagai kesatuan keluarga yang terwujud karena perkawinan, harus hidup bersama-sama dan karena itu harus memiliki benda atau barang. Dimana kesatuan kerabat sebagai masyarakat berarti sosial yang penting, maka kekayaan keluarga inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga”, “harta bersama”.¹³²

Hak milik (*eigendom*) dalam buku ketiga Pasal 570 KUHPerdara adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum bedasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.¹³³

Harta bersama berarti harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama, jadi kepemilikan harta bersama dalam kewarisan adalah hak untuk menikmati kegunaan harta warisan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap harta itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau harta peninggalan ahli waris yang dimanfaatkan secara bersama-sama.

¹³² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (lengkap dan praktis)*, (Jakarta : Sinar grahika, 2004), h. 159

¹³³ R. Subekti, *Op.Cit.* h.171

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan tentang permasalahan yang sudah penulis teliti dengan judul “analisa hukum Islam terhadap alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam sistem pelaksanaan pembagian harta warisan di Kampung Lalang, penetapan ahli warisnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun dalam pembagiannya masyarakat Kampung Lalang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum Islam, yakni dengan cara perdamaian dalam artian seluruh harta warisan itu dibagi dengan cara bagi rata, namun sebelum harta warisan tersebut dibagi dengan cara perdamaian, masyarakat Kampung Lalang terlebih dahulu sudah mengetahui bagian haknya secara pembagian *faraidh*.
2. Alasan-alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Kampung Lalang dinilai tidak signifikan dan berdampak ke arah negatif, yang mana tidak dapat dipungkiri bahwa penundaan pembagian harta warisan ini masih menimbulkan persoalan, yakni perselisihan pendapat hingga memicu perpecahan dalam keluarga. Meskipun Islam tidak memberikan batasan yang tegas kapan seharusnya pelaksanaan pembagian warisan, namun berdasarkan asas *Ijbari* dan asas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semata akibat kematian, seharusnya waktu pebagian harta warisan itu harus disegerakan dan tidak terlalu lama setelah meninggalnya *muwaris*.

3. Setelah dianalisa menurut hukum Islam, setidaknya ada empat alasan yang menuntut kita untuk merubah perbuatan “menunda” tersebut, yaitu :
bertentangan dengan dalil/hukum Islam yang ada, karena adanya kekhawatiran akan termakannya hak yang semetinya milik saudaranya, apabila penundaan waris tetap dilakukan penulis khawatir peristiwa ini akan dianggap sebagai suatu bentuk hukum dan mereka berfikir hal itu tidak salah dalam pembagian harta warisan sehingga hal ini akan mengandung kemudharatan, dan alasan terakhir penulis berasumsi bahwa harta warisan merupakan suatu amanah yang mesti ditunaikan kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya

B. Saran

1. Penulis mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kampung Lalang yang pastinya akan berstatus sebagai ahli waris, agar melaksanakan pembagian harta warisan dan tidak menunda pelaksanaan pembagian warisan tersebut dan dilakukan sesuai syariat Islam yang telah ditetapkan Allah SWT, karena sesungguhnya itu adalah cara yang paling mudah dan senang untuk dimengerti.
2. Tidak lupa pula penulis menyarankan kepada seluruh umat Islam, agar dapat memahami dan mempelajari sekaligus mendalami ilmu *faraidh*, karena ilmu *faraidh* adalah ilmu yang sangat penting dan akan selalu berguna di dalam kehidupan berkeluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Affendy. Tenas, *Tunjuk Ajar Melayu :Butir-Butir Budaya Melayu Riau*, (Pekanbaru : Dewan Kesenian Riau, 1994)
- Ainun Dtf, “Pengertian Pendidikan: Fungsi, Jenis, Tujuan Pendidikan (Ahli & Umum)”, artikel di akses pada 12 Februari 2021 dari <https://salamadian.com/pengertian-pendidikan/>
- Ajib. Muhammad, *Fiqh Hibah & Waris*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Sunan Abu Daud*, (Iskandariah : Markas Nur Islam, ttb), juz. 6 alih bahasa oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet- 2, Jilid 2
- Al-Asir. Mujiddin Abu al-Saadat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazur Ibnu, *Jami’ al-Ushul al-Hadits Rasul*, (ttp : Maktabah al-Hawali, tt), juz 11, Cet. 1, h. 181, Trj. Abdu al-Qadar arnu’ta
- Al-Asyifistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Ashas. *Sunan Abu Daud*, (Mesir : ttp, ttb), juz. 4, Bab : Fil Kalalah
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali , *As-Sunan al-Kubra*, (Beirut : Dar al Fikr, 1925), juz. 10
- Al-Fadhal. Abi, *Musnad al-Jami’*, (ttp: tp,tt), juz 6
- An-Naisaburri, Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim, *Mustadrak ‘ala Sahihain*, (Beirut : Daarul Kutub ilmiah, 1990), trj. Musthafa Abdul Qadir atha’, juz. 4, Bab. Kitab Faraidh
- Az-Zuhaili, Wahbah, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet. 1, Jilid 10
- Ash Shiddiqy. Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), Cet. 1
- Azwar. Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Cet 3
- Darussamin. Zikri, “Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam”, *Jurnal Sosial Budaya : Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya*, Volume. 11. No. 2, (2014)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2012)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, “ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta : Presiden Republik Indonesia, 1991).

Fariz. Ade, *Fiqh Mawaris*, (Pekanbaru : Suska Press)

Haar.Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1978),

Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014)

Hakim. Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, (Padang Panjang :Sa’diyah Putera, 1927), h.27

Harahap. Yahya, *Peraktek Hukum Waris tidak pantas membuat generalisasi* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988)

Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007)

Jaya. Dwi Putra, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu : Zara Abadi, 2020)

Kadir, Abdul. “Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)”. Skripsi : UIN Sultan Syarif Kasim, 2015.

Khaldun. Ibnu, *Mukaddimah*, alih bahasa oleh Masturi Ilham et.al. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2011)

M. Syarif, *Membagi Harta Warisan*, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009), Cet. 1

Mardini, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Maruzi. Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidin, 1981)

Muhammad. Assaiyid Bin Salim Bin Hafidz Bin Abdullah, *TakmilahJubdah al-Hadits fi Fihi al-Mawaris*, (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012)

Moh. Anwar, *FARAIDL (hukum warisdalam Islam) dan masalah-masalahnya*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1981),

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet-1

Parman. Ali, *Kewarisan dalam al-Qur’an*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995),



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pemerintah Kampung Lalang, *Profile Kampung Lalang*, 2020. (Lalang: Sekretariat Desa)
- Peryandja, Fela. “Penundaan Pembagian Warisan dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam”. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur : Balai Pusaka, 2014), Cet-41
- Rahman. Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1981)
- Rahmawati, “Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, No. 3 (2016)
- Redaksi Dalam Islam “Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam”, diakses pada 03 Agustus 2020 dari artikel <https://dalamislam.com/hukum-islam/pembagian-warisan-menurut-hukum-islam>
- Ritonga. Rahman, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1996), Jilid. 1
- Rofiq. Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1995)
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Cet-6
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998)
- Sabiq. Sayid, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Fikry, 1983)
- Siak, Kajian Akademis Desa Adat Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.
- Soekanto. Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suharini, Suci. “Perkembangan Hukum Kewarisan pada Masyarakat Melayu Riau pada Saat ini.” Depok: Uiniversitas Indonesia 2008
- Suhayib, “Formulasi Hukum Islam Dalam Konteks Pembaharuan Pemikiran Islam”, *Hukum Islam*, (Pekanbaru: Fakultas Syari’ah IAIN SUSQA, 2002), Terbitan ke 4, jilid 6, h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Suhayib, “Pemikiran Said Nursi dalam Pemberdayaan Politik (al-Tahkim al-Siyasi) Masyarakat Muslim Turki (Studi atas Kitab al-Matsnawi an-Nuri), *an-Nida*’, (Riau: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN SUSKA, 2013), Jilid 38

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2019), Cet. 1

Suma. Muhammad Amin , *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013)

Syakir. Syaikh Ahmad, *Mukhtasar Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh Suharlan dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2016), Cet-3, Jilid 2

Syarifuddin. Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)

Syarifuddin. Amir, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung : 1984) Cet, 1

Syarkun. Syuhada’, *Menguasai Ilmu Faraid*, (Jakarta : Pustaka Syarkun, 2012)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet-3

Thalib. Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), Cet-2

Wahid. Abdul dan Muhibbnin, *Hukum Kewarisan sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2011)

Yahya. Mukhtar dan Fachturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1983)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan**

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan”, yang ditulis oleh :

Nama : Mutia Refnita
 NIM : 11721201084
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al Syakhsyah*)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
Mutasir, M.Sy

Penguji I
Dr.H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN
PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KAMPUNG
LALANG KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK, ditulis oleh saudara :

Nama : Mutia Refnita
NIM : 11721201084
Program Studi : Hukum Keluarga

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 15 Oktober 2020
Narasumber : Hairul Amri., M.A

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 03 Februari 2021
Narasumber

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Hairul Amri., M.A
NIP. 19730823 2001 12 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA | : mutia refnita |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11721201084 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Analisis hukum islam terhadap alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dikampung lalang kecamatan sungai apit kabupaten siak |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Kamis / 15 Oktober 2020 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Hairul Amri, MA

Catatan

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/38231
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1511/2021 Tanggal 28 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

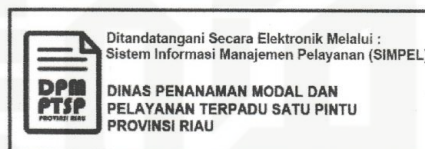
- | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | MUTIA REFNITA |
| 2. NIM / KTP | : | 11721201084 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KAMPUNG LALANG KECAMATAN SUNGAI
APIT KABUPATEN SIAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KAMPUNG LALANG, KECAMATAN SUNGAI APIT, KABUPATEN SIAK. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN SUNGAI APIT

Jl. Setia Raja No. 01 Sungai Apit Telp. (0766) 51004 Fax. (0766) 322093 Kode Pos 28762

REKOMENDASI RISET

NOMOR : 400/KESSOS/2021/51

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak, Nomor : 071/Kesbangpol/35, Tanggal 10 Februari 2021 perihal seperti pada pokok surat diatas, maka kami memberikan Rekomendasi kepada Saudara :

Nama : **MUTIA REFNITA**
NIM : **11721201084**
Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
Judul Penelitian : **"ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KAMPUNG LALANG KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK"**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra riset dalam pengumpulan data.
- Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
- Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar hasil riset/Pra Riset yang telah dilaksanakan kepada Kantor Camat Sungai Apit Kabupaten Siak.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset/Pra Riset ini, terima kasih.

DIKELUARKAN DI : SUNGAI APIT
PADA TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021

a.n. CAMAT SUNGAI APIT

SEKCAM

Kasi Kesejahteraan Sosial



NARTAM, M.Pd

NIP. 19680302 199303 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
- Penghulu Lalang Kecamatan Sungai Apit;
- Yang Bersangkutan;
- Arsip

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

5. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sumatra Utara
Prof. Dr. H. H. Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KECAMATAN SUNGAI APIT

KAMPUNG LALANG

Jl. Karya Utama Kampung Lalang kec. Sungai Apit Kab Siak RT 001 RK 001 Dusun 01 Kode Pos 28662

SURAT KETERANGAN HASIL RISET

No : 400/SKHR/LLG/II/2021/02

Menindak lanjuti Surat Camat Sungai Apit Nomor : 400/KESSOS/2021/51 Perihal Rekomendasi Riset atas nama :

Nama : **MUTIA REFNITA**

Nim : 11721201084

Program Study : "Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak"

Dengan ini Penghulu Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan **RISET** dengan judul dan waktu yang ditentukan .

Demikianlah surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lalang, 19 Februari 2021

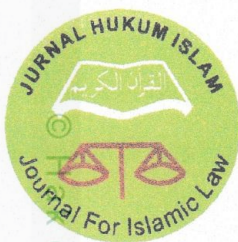
Penghulu Lalang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

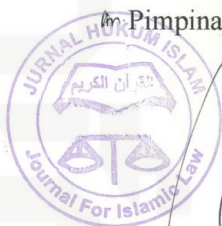
NAMA : MUTIA REFNITA
NIM : 11721201084
JURUSAN : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
JUDUL : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PENUNDAAN
 PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Pembimbing: Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu 'alaikum Wr. Wb...



Penulis bernama **Mutia Refnita** dilahirkan pada tanggal 06 Agustus 1999 di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Lahir dari pasangan Ayahanda Azmar dan Ibunda Ilal Farida. Merupakan anak pertama dari tiga orang bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2004 di SDN 020 Lalang sampai tahun 2010, tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang sampai tahun 2014, dan penulis melanjutkan pendidikan di tempat yang sama yaitu MA Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang sampai tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi masuk melalui jalur seleksi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2017-2021.

Melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1.A pada Februari 2020 dengan nilai sangat memuaskan, melakukan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Kampung Lalang Kec. Sungai Apit Kab. Siak dari Juni-Agustus 2020 dengan nilai sangat memuaskan. Kemudian melakukan penelitian dengan judul "**Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan**" dari Agustus-Maret 2021 dan dinyatakan LULUS pada 23 Juni 2021 dalam sidang Munaqasyah Ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar (SH) dengan predikat Cumlaude, semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal 'alamin.....*

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb